



PEMERINTAH KABUPATEN
JOMBANG

#Ayo
LebihBaik

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

LKJIP

DINAS PERTANIAN

TAHUN ANGGARAN

2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pertanian
Kabupaten Jombang
Tahun Anggaran 2025



DINAS PERTANIAN
KABUPATEN JOMBANG



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyusunan LKjIP berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, program, dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2025. Laporan ini menyajikan capaian kinerja serta hasil pengukuran dan evaluasi terhadap target yang telah ditetapkan, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun berikutnya. Selain itu, LKjIP diharapkan dapat mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, serta berorientasi pada hasil.

Penyusunan LKjIP ini merupakan hasil kerja dan kontribusi seluruh jajaran Dinas Pertanian Kabupaten Jombang. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kerja sama dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta penyusunan laporan ini.

Kami menyadari bahwa LKjIP ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan sebagai bahan penyempurnaan pada masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi salah satu instrumen dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas serta kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.

Jombang, 31 Desember 2025
**KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN JOMBANG**



Ir. MUCH. RONY, M.M
Pemuda Utama Muda/ IVc
NIP. 19670919 199203 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	6
1.3 Sumber Daya Manusia	12
1.4 Isu Strategis	13
1.5 Cascading Kinerja	17
1.6 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi.....	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	23
1.7 Perencanaan Strategis.....	23
1.8 Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	24
1.9 Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026.....	28
BAB 2 Akuntabilitas Kinerja	30
2.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	30
2.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	30
2.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir	36
2.1.3 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah.	39
2.1.4 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional.	42
2.1.5 Efisiensi penggunaan sumber daya	44
2.2 Realisasi Anggaran	54
2.3 Upaya Perbaikan Kinerja	55
BAB III PENUTUP	57
2.4 Kesimpulan.....	57
2.5 Inovasi dan Penghargaan	57
2.6 Upaya Perbaikan	57
LAMPIRAN	59
1. Perjanjian Kinerja	59
2. Penetapan IKU.....	62

3.	KKPT	64
4.	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	66
2.7		67
5.	Rencana Aksi Pencapaian Kinerja	68
6.	Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi	70
7.	Pengukuran Kinerja	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Pertanian Kabupaten Jombang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah melalui pelaksanaan program dan kegiatan di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, khususnya dalam meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian. Dalam pelaksanaannya, pencapaian kinerja menghadapi berbagai tantangan, antara lain perubahan kondisi iklim dan cuaca, dinamika produktivitas dan luas panen, serta ketersediaan sarana dan prasarana pertanian yang dapat memengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan.

Kondisi tersebut menuntut pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada hasil dan manfaat yang dihasilkan. Oleh karena itu, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja untuk mengetahui tingkat pencapaian target, mengidentifikasi faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun ketidaktercapaian kinerja, serta menentukan langkah perbaikan yang diperlukan.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025, Dinas Pertanian Kabupaten Jombang menyusun **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025**. LKjIP menjadi instrumen untuk menyajikan capaian kinerja secara objektif sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pengendalian kinerja pada tahun berikutnya.

Penyusunan LKjIP merupakan bagian dari pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Dengan demikian, LKjIP diharapkan tidak hanya menjadi dokumen pertanggungjawaban administratif, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai instrumen manajemen kinerja untuk mendorong peningkatan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan pertanian di Kabupaten Jombang.

1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021, serta Peraturan Bupati Jombang Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Dinas Pertanian Kabupaten Jombang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pertanian.

Susunan Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Jombang meliputi Kepala Dinas; Sekretariat; Bidang Produksi Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura; Bidang Sarana Prasarana Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura; Bidang Perlindungan, Pasca Panen, dan Pemasaran Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura; Unit Pelaksana Teknis; serta Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Jombang secara efektif, terukur, dan berkelanjutan, tugas dan fungsi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Produksi Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Sarana Prasarana Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Perlindungan, Pasca Panen dan Pemasaran Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan Fungsi unit kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program dan evaluasi. Fungsi sekretariat adalah sebagai berikut:

- 1) Perumusan dan penyusunan kebijakan serta pedoman operasional pelaksanaan dan evaluasi kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan, administrasi dan pengembangan pegawai, penyusunan rencana dan evaluasi program dan anggaran rumah tangga, serta penatausahaan keuangan;
- 2) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan, anggaran dan perundang-undangan;
- 3) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- 4) Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- 5) Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga;
- 6) Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan aparatur sipil negara;
- 7) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta pelayanan publik;
- 8) Pengelolaan aset;
- 9) Pengelolaan kearsipan;
- 10) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan data dan sistem informasi;
- 11) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan strategis dan pelaksanaan program, kegiatan dan realisasi anggaran secara terukur dan berkelanjutan.
- 12) Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi dan koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Penilaian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Laporan

Keuangan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkup Dinas;

- 13) Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan Publik (SPP);
 - 14) Pelaksanaan koordinasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi; dan
 - 15) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian.
- b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset
- 1) Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional;
 - 2) Melaksanakan administrasi kepegawaian, melaksanakan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier pegawai;
 - 3) Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga, perjalanan dinas dan perlengkapannya, ketatausahaan (surat menyurat) dan kearsipan;
 - 4) Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan serta pemeliharaan kantor;
 - 5) Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup Dinas Pertanian;
 - 6) Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepastakaan Dinas Pertanian;
 - 7) Mengkoordinir dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan inovasi pendukung kebijakan daerah;
 - 8) Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas;
 - 9) Membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur;
 - 10) Melaksanakan penatausahaan keuangan, meliputi pengelolaan anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi/pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
 - 11) Melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya;

- 12) Menyusun, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan anggaran;
- 13) Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barang-barang inventaris kantor;
- 14) Melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai; dan
- 15) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

c. Bidang Produksi Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura

Bidang Produksi Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian bidang produksi tanaman pangan, tanaman perkebunan, dan tanaman hortikultura. Fungsi Bidang Produksi Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura adalah sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan peningkatan produksi dan produktivitas pertanian melalui optimalisasi pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- 2) Penyusunan peta potensi pengembangan komoditas utama;
- 3) Penyusunan target, pemantauan, analisa dan evaluasi perkembangan luas tanam dan panen tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;
- 4) Fasilitasi penyelenggaraan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan petani/penyuluh;
- 5) Fasilitasi pengembangan Badan Usaha Milik Petani (BUMP) dan Pembiayaan Usaha Pertanian;
- 6) Fasilitasi sarana prasarana penyuluhan;
- 7) Penyediaan rakitan teknologi budidaya tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura tepat guna dan spesifik lokasi;
- 8) Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan pertanian;
- 9) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan fungsi bidang Produksi Tanaman Pangan, Perkebunan Dan Hortikultura;
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian.

d. Bidang Sarana Prasarana Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura

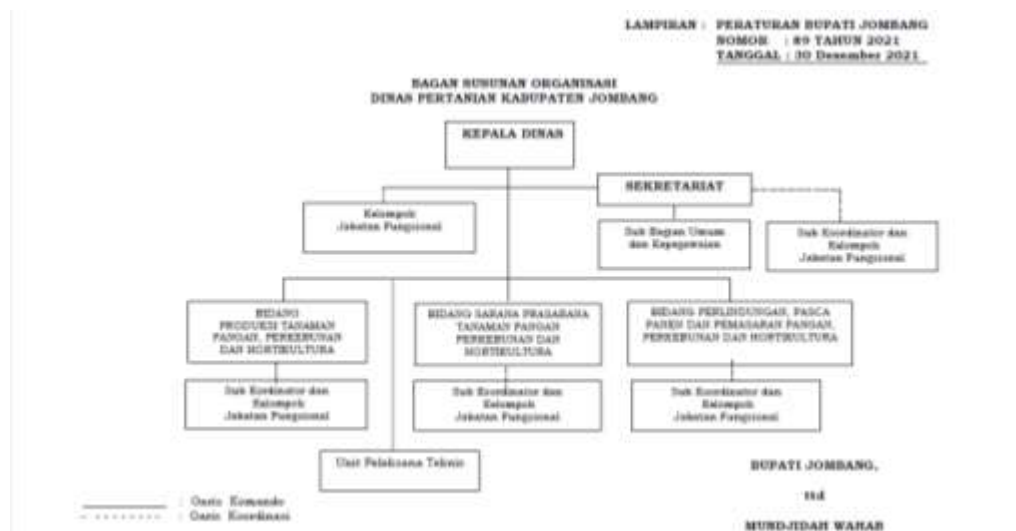
Bidang Sarana Prasarana Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian bidang produksi tanaman pangan, tanaman perkebunan, dan tanaman hortikultura. Fungsi Bidang Sarana Prasarana Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura adalah sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan peningkatan Indeks Pertanaman (IP) melalui pendayagunaan lahan, air, prasarana, sarana dan alat mesin pertanian;
 - 2) Penyusunan peta Pengembangan potensi sarana, prasarana, dan alat mesin pertanian;
 - 3) Fasilitasi Penyediaan dan pengawasan penggunaan pupuk, bibit/benih, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
 - 4) Fasilitasi Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana pertanian/Penyuluhan;
 - 5) Fasilitasi penyediaan alat mesin, sarana dan prasarana pertanian;
 - 6) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura;
 - 7) Penyusunan peta dan pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
 - 8) Penyusunan standard operasional prosedur (SOP) pelaksanaan fungsi lingkup bidang sarana dan prasarana;
 - 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian.
- e. Bidang Perlindungan, Pasca Panen dan Pemasaran Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura
- Bidang Perlindungan, Pasca Panen dan Pemasaran Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian bidang produksi tanaman pangan, tanaman perkebunan, dan tanaman hortikultura. Fungsi Bidang Perlindungan, Pasca Panen dan Pemasaran Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura adalah sebagai berikut:
- 1) Perumusan kebijakan pengendalian kehilangan hasil (losses) akibat serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan bencana pertanian;
 - 2) Perumusan kebijakan Pemasaran dan Perizinan Usaha Pertanian;
 - 3) Perumusan kebijakan pasca panen, asuransi dan bencana pertanian;
 - 4) Penyusunan peta serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan bencana pertanian melalui pengumpulan, pengolahan dan analisa data;

- 5) Fasilitas penyelenggaraan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT);
 - 6) Fasilitas Pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan penanggulangan bencana pertanian;
 - 7) Fasilitas pasca panen, asuransi dan pencegahan/penanggulangan bencana pertanian;
 - 8) Fasilitas pemasaran dan pembinaan perizinan usaha pertanian;
 - 9) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang usaha tani dan perlindungan tanaman;
 - 10) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan fungsi lingkup bidang Perlindungan, Pasca Panen dan Pemasaran Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura;
 - 11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pertanian.
- f. Unit Pelaksana Teknis
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, maka susunan organisasi dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Jombang

1.3 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dinas Pertanian Kabupaten Jombang memiliki sumber daya manusia sebanyak 50 (lima puluh) pegawai. Komposisi sumber daya manusia tersebut per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Kategori ASN

Tabel Sumber Daya Manusia Berdasarkan Kategori ASN

No.	Kategori ASN			Total
	PNS	PPPK	PPPK Paruh Waktu	
1	20	3	37	50

Sumber: diolah, Dinas Pertanian 2025

2. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Unit Kerja

Tabel Sumber Daya Manusia Berdasarkan Unit Kerja

No.	Unit Kerja					Total Jumlah
	Sekretariat	Bidang Produksi TPPH	Bidang Sarana Prasarana TPPH	Bidang Perlindungan, Pasca Panen dan Pemasaran TPPH	UPT	
1.	14	8	10	7	11	50

Sumber: diolah, Dinas Pertanian 2025

3. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan

No.	Unit Kerja						Total Jumlah
	IX	IV	III	II	I	- (PPPK Paruh Waktu)	
1.	3	5	13	2	-	37	50

Sumber: diolah, Dinas Pertanian 2025

4. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan

No.	Unit Kerja					Total Jumlah
	Pasca Sarjana (S2)	Sarjana S1/D-IV	D3	SMA (Sederajat)	SMP (Sederajat)	
1.	8	26	1	15	-	50

Sumber: diolah, Dinas Pertanian 2025

5. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Kategori ASN		Total Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
1.	30	20	50

Sumber: diolah, Dinas Pertanian 2025

1.4 Isu Strategis

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pertanian Kabupaten Jombang senantiasa mempertimbangkan isu-isu strategis sebagai bentuk respons terhadap dinamika kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maupun perkembangan kondisi pertanian di Kabupaten Jombang. Dinas Pertanian memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, serta peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pertanian.

Kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian sangat dipengaruhi oleh kesiapan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dan petani, ketersediaan sarana dan prasarana pertanian, dukungan teknologi, kondisi sumber daya alam, serta koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi menjadi salah satu faktor penting dalam perumusan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi program dan kegiatan pembangunan pertanian.

Secara konkret, sinergi pembangunan pertanian dilaksanakan melalui koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, perangkat daerah terkait, pemerintah kecamatan dan desa, penyuluh pertanian, kelompok tani, gabungan kelompok tani, serta pelaku usaha pertanian dalam rangka meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah, dan daya saing hasil pertanian.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Jombang antara lain:

1. Produktivitas dan produksi komoditas pertanian belum sepenuhnya optimal dan masih dipengaruhi oleh kondisi iklim, cuaca, serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), serta dinamika luas tanam dan luas panen;

2. Ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian belum optimal, termasuk jaringan irigasi pertanian, jalan usaha tani, alat dan mesin pertanian, serta sarana produksi;
3. Kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pertanian masih perlu ditingkatkan, baik petani, kelembagaan petani, maupun tenaga penyuluh pertanian;
4. Penerapan teknologi dan inovasi pertanian belum merata, sehingga diperlukan penguatan pendampingan dan penerapan teknologi yang sesuai dengan kondisi spesifik lokasi;
5. Akses pemasaran dan daya saing hasil pertanian masih perlu diperkuat, termasuk pengembangan pascapanen, pengolahan hasil, dan perluasan akses pasar;
6. Ketersediaan data pertanian yang akurat dan mutakhir masih perlu diperkuat sebagai dasar perencanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja pembangunan pertanian.

Dinamika Lingkungan Strategis

Dinamika perkembangan lingkungan merupakan gambaran mengenai berbagai kondisi yang terjadi di dalam maupun di luar organisasi yang dapat memengaruhi arah kebijakan dan pencapaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Jombang. Secara garis besar, lingkungan strategis Dinas Pertanian terdiri atas lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal

Lingkungan internal terdiri atas faktor strategis yang secara umum dapat dikelola oleh manajemen Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.

A. Faktor Kekuatan Organisasi

1. Dinas Pertanian Kabupaten Jombang memiliki tugas dan fungsi yang jelas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian, sehingga menjadi landasan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan pertanian;
2. Dukungan regulasi dan dokumen perencanaan berupa Renstra, RKPD, serta dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan;

3. Ketersediaan SDM aparatur dan tenaga penyuluh pertanian yang mendukung pelaksanaan pembinaan, pendampingan, pengawalan, dan pelayanan kepada pelaku usaha pertanian;
4. Ketersediaan kelembagaan petani berupa kelompok tani dan gabungan kelompok tani yang dapat menjadi mitra dalam pelaksanaan program pembangunan pertanian;
5. Koordinasi dan sinergi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, perangkat daerah terkait, pemerintah desa, lembaga penelitian, perguruan tinggi, serta pelaku usaha pertanian dalam mendukung pembangunan pertanian;
6. Potensi sumber daya pertanian Kabupaten Jombang yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah, dan daya saing komoditas pertanian.

B. Faktor Kelemahan Organisasi

1. Keterbatasan sarana dan prasarana pertanian pada beberapa wilayah yang dapat memengaruhi efektivitas dan efisiensi usaha tani;
2. Keterbatasan dan pemerataan kompetensi SDM, baik aparatur, penyuluh maupun pelaku usaha pertanian dalam menghadapi perkembangan teknologi dan tuntutan pembangunan pertanian;
3. Belum optimalnya pemanfaatan data dan sistem informasi pertanian sebagai dasar perencanaan, pengendalian, pengukuran, dan evaluasi kinerja;
4. Belum optimalnya penerapan teknologi dan inovasi pertanian pada seluruh pelaku usaha pertanian;
5. Keterbatasan sumber daya anggaran dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan pertanian yang cukup luas dan kompleks;
6. Pengawasan dan evaluasi terhadap dampak program dan kegiatan masih perlu diperkuat agar pelaksanaan pembangunan lebih berorientasi pada hasil dan manfaat.

2. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal merupakan faktor di luar kendali langsung Dinas Pertanian, namun dapat memengaruhi pencapaian kinerja organisasi.

A. Faktor Peluang Organisasi

1. Dukungan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap peningkatan produksi, produktivitas, ketahanan pangan, dan kesejahteraan petani;
2. Perkembangan teknologi dan inovasi pertanian yang semakin terbuka untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha tani;
3. Potensi pasar produk pertanian yang dapat dikembangkan melalui peningkatan kualitas, kontinuitas produksi, pengolahan, dan pemasaran;
4. Perkembangan digitalisasi yang dapat dimanfaatkan untuk penyediaan data, penyebaran informasi, pelayanan, pemasaran, dan pengembangan usaha pertanian;
5. Dukungan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha, dan masyarakat dalam pengembangan inovasi serta peningkatan kapasitas pelaku usaha pertanian;
6. Potensi diversifikasi dan hilirisasi produk pertanian untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas.

B. Faktor Tantangan Organisasi

1. Perubahan iklim dan kondisi cuaca yang semakin tidak menentu berpotensi memengaruhi pola tanam, produktivitas, luas panen, dan produksi pertanian;
2. Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan risiko bencana pertanian yang dapat menyebabkan kehilangan hasil dan menurunkan produktivitas;
3. Alih fungsi lahan pertanian yang dapat mengurangi luas lahan produktif dan mengancam keberlanjutan produksi pertanian;
4. Fluktuasi harga sarana produksi dan harga hasil pertanian yang dapat memengaruhi biaya produksi dan pendapatan petani;
5. Persaingan pasar dan tuntutan kualitas produk pertanian yang semakin tinggi sehingga diperlukan peningkatan daya saing dan efisiensi usaha tani;
6. Regenerasi petani yang belum optimal serta semakin kompleksnya tuntutan kompetensi petani dalam menghadapi perkembangan teknologi dan pasar;

7. Keterbatasan sumber daya air dan tekanan terhadap sumber daya alam yang dapat memengaruhi keberlanjutan produksi pertanian.

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan dinamika lingkungan strategis tersebut, beberapa isu penting yang menjadi perhatian Dinas Pertanian Kabupaten Jombang antara lain:

1. Belum optimalnya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
2. Belum optimalnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian;
3. Dampak perubahan iklim, serangan OPT, dan bencana pertanian terhadap produksi dan produktivitas;
4. Belum optimalnya kapasitas SDM, kelembagaan petani, serta regenerasi petani;
5. Belum optimalnya penerapan teknologi dan inovasi pertanian;
6. Belum optimalnya pengelolaan pascapanen, akses pemasaran, dan peningkatan nilai tambah produk pertanian;
7. Perlunya penguatan kualitas data pertanian sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan;
8. Perlunya penguatan sinergi antar-OPD dan pemangku kepentingan dalam mendukung peningkatan kinerja pembangunan pertanian.

1.5 Cascading Kinerja

Tujuan dan sasaran dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) diturunkan dan ditindaklanjuti ke dalam tujuan dan sasaran Dinas Pertanian untuk periode tiga tahun ke depan. Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024–2026 dengan arah kebijakan “Mewujudkan Jombang Unggul Berbudaya Berbasis Agribisnis”, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah jangka menengah **tujuan 1** dan **tujuan 4** Pemerintah Kabupaten Jombang, yaitu:

- **Tujuan 1:** *"Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik";*

- **Tujuan 4:** *"Meningkatkan Daya Saing dan Pemerataan Ekonomi melalui Pemantapan Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan yang Mendorong Pengembangan Agrobisnis dan Sektor Unggul Lainnya."*

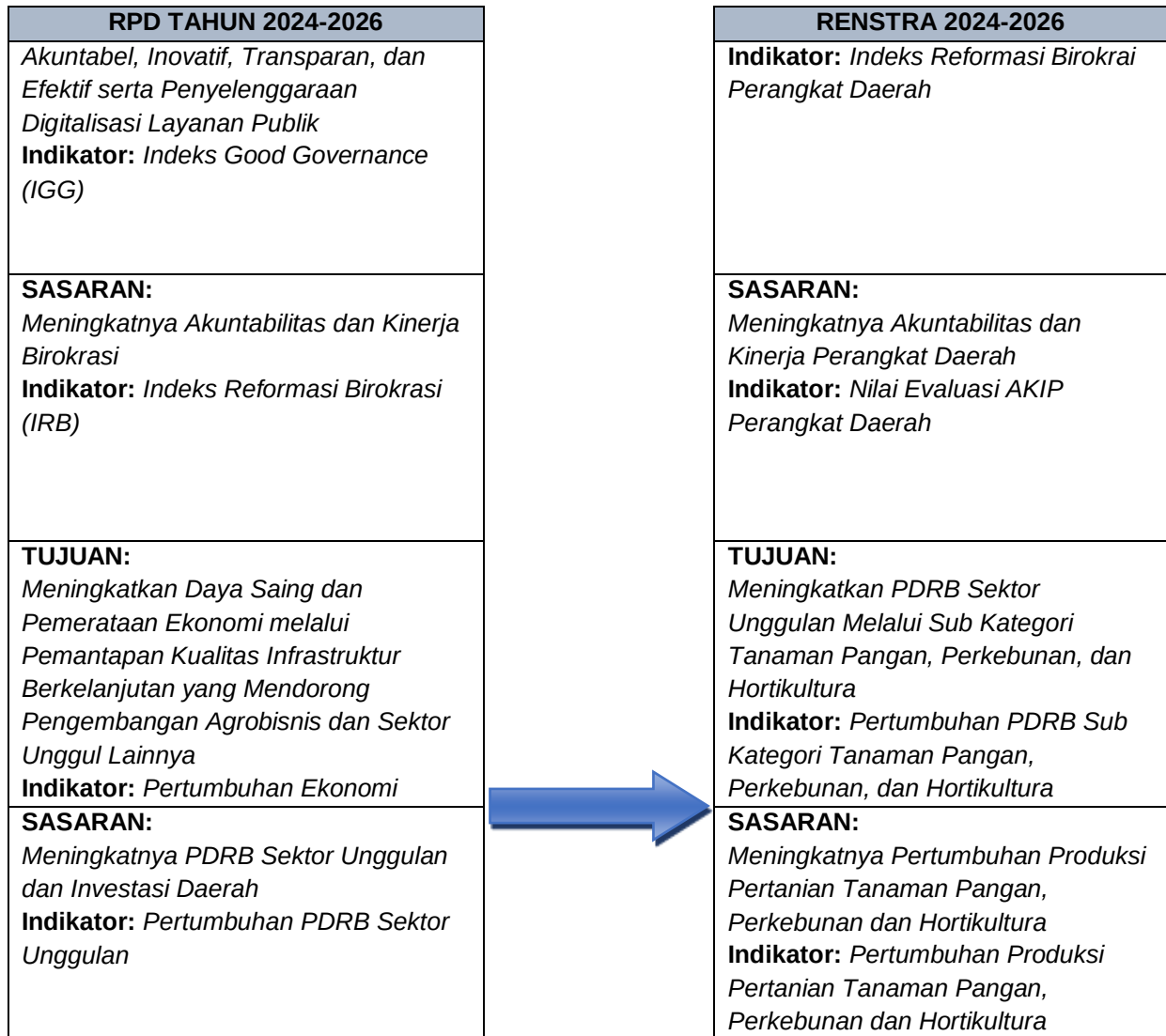
Dinas Pertanian Kabupaten Jombang berperan dalam mendukung pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang, khususnya pada **tujuan 1** dan **tujuan 4**, sebagai berikut:

- **Tujuan 1:** *"Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik."*
 - Dalam mendukung tujuan tersebut, **Dinas Pertanian Kabupaten Jombang** berkomitmen untuk meningkatkan **akuntabilitas dan kinerja birokrasi** di lingkungannya melalui penguatan sistem manajemen kinerja, pelaporan yang transparan, serta pelayanan publik yang responsif dan berkualitas.
- **Tujuan 4:** *"Meningkatkan Daya Saing dan Pemerataan Ekonomi melalui Pemantapan Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan yang Mendorong Pengembangan Agrobisnis dan Sektor Unggul Lainnya."*
 - Untuk mendukung tujuan tersebut, **Dinas Pertanian Kabupaten Jombang** berfokus pada peningkatan **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)** khususnya pada **sub-kategori tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura**, melalui optimalisasi lahan pertanian, peningkatan produktivitas, serta penguatan kapasitas petani dan kelembagaan tani.

Keterkaitan RPD Kabupaten Jombang dengan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Jombang tergambar sebagaimana berikut.

RPD TAHUN 2024-2026
TUJUAN 1: <i>Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional,</i>

RENSTRA 2024-2026
TUJUAN: <i>Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi</i>



Gambar 1.2 Keterkaitan RPD Kabupaten Jombang dengan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026

Tujuan dan sasaran dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 diturunkan dan ditindaklanjuti ke dalam tujuan dan sasaran Dinas Pertanian untuk periode lima tahun ke depan. Keterkaitan RPD Kabupaten Jombang dengan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Jombang tergambar sebagaimana berikut.

RPJMD TAHUN 2025-2029	RENSTRA 2025-2029
TUJUAN : Terwujudnya Ekonomi yang Berkualitas	TUJUAN: Meningkatkan PDRB Sub Kategori

RPJMD TAHUN 2025-2029	RENSTRA 2025-2029
Indikator: <i>Indeks Gini</i>	<i>Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura</i> Indikator: <i>Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura</i>
SASARAN: <i>Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan</i> Indikator: <i>Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan</i>	SASARAN: 1. <i>Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura</i> 2. <i>Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif</i> Indikator: 1. <i>Pertumbuhan Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura</i> 2. <i>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</i>

Gambar 1.3 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Jombang dengan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029

1.6 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi

Berdasarkan surat Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Nomor 000.8/5732/415.10/2025 tanggal 4 Agustus 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas AKIP PD Tahun 2025, nilai akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Tahun 2025 adalah 78,80 termasuk kategori BB dengan predikat “Baik” dengan catatan hasil evaluasi sebagai berikut:

- Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan Tahun 2025 belum menggambarkan upaya perbaikan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.
- Sudah dilakukan dialog kinerja minimal setiap triwulan untuk membahas langkah perbaikan perencanaan kinerja, namun komitmen pegawai belum sepenuhnya tergambarkan dikarenakan kurang optimalnya pemahaman pegawai terkait tujuan perangkat daerah serta rencana aksi yang dapat dilakukan perubahan karena hasil dari evaluasi sebelumnya untuk langkah perbaikan dan percepatan pencapaian kinerja.
- Penjelasan masih belum relevan untuk capaian kinerja yang belum selaras. Hal ini terlihat pada salah satu indikator kinerja, yaitu “Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian yang Memadai (Jalan

Usaha Tani)”, di mana capaian pada level OPD sebesar 96,27%, sedangkan pada level di bawahnya mencapai 100%.

- d. Pengukuran kinerja belum dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar dalam melakukan penyesuaian anggaran guna mendukung pencapaian target kinerja.
- e. Pemanfaatan hasil pengukuran kinerja dalam rangka peningkatan dan pencapaian kinerja organisasi belum dipahami secara menyeluruh oleh seluruh pegawai.
- f. Seluruh pegawai sudah mau membaca namun belum terlihat adanya keterlibatan aktif dalam memberikan masukan terhadap kualitas LKJiP.
- g. Tindak lanjut hasil evaluasi tahun 2024 belum sepenuhnya efektif meningkatkan Implementasi SAKIP tahun 2025 (terjadi penurunan nilai komponen perencanaan dan pelaporan).

Dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen kinerja, dapat direkomendasikan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

- a. Memastikan kembali analisis/dasar penetapan target tersebut dengan paling tidak hasil evaluasi tahun sebelumnya, keterkaitan dengan kinerja di atasnya, dan hal penting lain untuk menjelaskan secara cukup alasan ditetapkannya target kinerja dalam Kertas Kerja Penetapan Target.
- b. Meningkatkan kualitas dialog kinerja dengan melakukan internalisasi komitmen serta menyusun langkah perbaikan dan percepatan pencapaian tujuan Perangkat Daerah melalui evaluasi kinerja secara sungguh-sungguh kepada seluruh pegawai.
- c. Melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang dan selaras sehingga kualitas kinerja bawahan bias mendukung kinerja level di atasnya. Perlu mengevaluasi kembali kinerja atasan-bawahan, agar terkoneksi dan memiliki hasil yang sikron. Sehingga jika terjadi kegagalan pencapaian pada target atasan bisa ditelusuri.
- d. Menerapkan penganggaran berbasis kinerja secara optimal dalam melakukan penyesuaian anggaran dimana hasil pengukuran kinerja titik awal untuk menentukan penyesuaian anggaran yang dibutuhkan.
- e. Meningkatkan pemahaman dan kepedulian Pegawai atas hasil pengukuran kinerja melalui dialog kinerja untuk menganalisis hasil pengukuran dan

pemanfaatannya dalam menyusun langkah perbaikan dan percepatan pencapaian target pada periode selanjutnya.

- f. Lakukan langkah-langkah inovatif untuk dapat memicu minat seluruh pegawai untuk peduli dan secara aktif memberikan masukan yang baik dan konkret dalam meningkatkan kualitas LKJiP.

BAB PERENCANAAN KINERJA

1.7 Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Jombang sebagai bentuk penjabaran dari RPD dan RPJMD Pemerintah Kabupaten Jombang disusun dengan memuat strategi, arah kebijakan, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Sebagai langkah perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu maka Renstra juga memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul, guna mendukung pencapaian arah rencana pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 dan 2025-2029.

a. Arah kebijakan rencana pembangunan daerah (RPD)

Arah kebijakan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang, yaitu:

“Mewujudkan Jombang Unggul dan Berbudaya Berbasis Agribisnis”

Berdasarkan arah kebijakan rencana pembangunan daerah, terdapat dua nilai dasar yang hendak diwujudkan dalam periode pembangunan tiga tahun kedepan, yakni nilai unggul dan berbudaya berbasis agribisnis.

b. Tema rencana pembangunan daerah (RPD)

Dalam rangka mewujudkan arah kebijakan RPD, telah ditetapkan tema pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2024, yaitu *“Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur Berkelanjutan yang Mendorong Industri Agribisnis dan Pembangunan Wilayah.”*

Dinas Pertanian mendukung pencapaian tujuan rencana pembangunan daerah, khususnya tujuan pertama, yaitu *“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik”* melalui peningkatan akuntabilitas dan kinerja birokrasi, serta tujuan keempat, yaitu *“Meningkatkan Daya Saing dan Pemerataan Ekonomi melalui Pemanapan Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan yang Mendorong Pengembangan Agrobisnis dan Sektor Unggul Lainnya”* melalui peningkatan PDRB sub kategori tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura.

c. Tujuan

Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada tujuan rencana pembangunan daerah didasarkan pada isu strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan tujuan daerah. Berikut ini tujuan yang ingin dicapai Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.

- 1) Meningkatkan PDRB sektor unggulan melalui sub kategori tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura;
- 2) Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi.

d. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai atau hasil yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Jombang guna mendukung tema pembangunan dan prioritas pembangunan. Berikut ini sasaran yang ingin dicapai Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.

- 1) Meningkatnya pertumbuhan produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;
- 2) Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah.

Berikut indikator sasaran yang digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan capaian kinerja.

- 1) Pertumbuhan produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;
- 2) Nilai evaluasi AKIP perangkat daerah.

1.8 Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan PERMENPAN No. 53 Tahun 2014. Perjanjian Kinerja merupakan lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati sebagai pemberi amanah kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pertanian Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2.

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pertumbuhan produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura	Pertumbuhan produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura	
		- Padi	1,30%
		- Jagung	1,30%
		- Kedelai	1,30%
		- Cabai Besar	1,30%
		- Cabai Kecil	1,30%
		- Bawang Merah	1,30%
		- Tembakau	1,30%
		- Tebu	1,30%
		- Kopi	1,30%
2.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi AKIP perangkat daerah	80,50 (A)

NO.	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)
1.	Meningkatnya ketersediaan sarana pertanian yang memadai	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian yang memadai		9.594.719.650
			- Sarana olah tanah	71,25%	
			- Sarana penanaman	37,99%	
			- Sarana panen	13,57%	
			- Sarana pengairan	39,46%	
2.	Meningkatnya ketersediaan prasarana pertanian yang	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian yang memadai		8.142.193.532

NO.	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)
	memadai		Jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT)	31,33%	
			- Jalan Usaha Tani (JUT)	37,02%	
3.	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian	22%	613.688.450
4.	Meningkatnya usaha pertanian yang sudah mendapatkan rekomendasi izin usaha	Program perizinan usaha pertanian	Persentase usaha pertanian yang sudah mendapatkan rekomendasi izin usaha	11,18%	26.779.500
5.	Meningkatnya kapasitas kelompok tani	Program penyuluhan pertanian	Persentase poktan yang mendapatkan pembinaan penyuluh yang naik kelas	4,92%	6.022.939.676
6	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	24.057.667.724
					48.457.988.532

Sumber: diolah, Dinas Pertanian 2025

Pagu anggaran APBD Tahun 2025 sebesar Rp. 48.457.988.532,- digunakan untuk kegiatan prioritas di Dinas Pertanian terutama peningkatan luas tambah tanam melalui pembangunan irigasi perpompaan dan perpipaan sehingga kebutuhan petani terhadap air dalam kegiatan budidaya dapat tercukupi. Kegiatan prioritas lainnya adalah pemberian bantuan hibah kepada koperasi multi pihak sebagai upaya mendukung penguatan kelembagaan dan pemberdayaan ekonomi petani secara kolektif. Terdapat kegiatan prioritas lain

dalam anggaran P-APBD Tahun 2025, antara lain hibah pupuk, benih, dan alat mesin pertanian (alsintan) yang ditujukan untuk mendukung peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha tani.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan PDRB Sub Kategori Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura	Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura	0,35%
2.	Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura	Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura	
		- Padi	345.714,23 Ton
		- Jagung	274.335,80 Ton
		- Kedelai	5.607,32 Ton
		- Cabai Besar	3.023,74 Ton
		- Cabai Kecil	7.349,87 Ton
		- Bawang Merah	2.593,28 Ton
		- Tembakau	92.133,72 Ton
		- Tebu	585.981,40 Ton
		- Kopi	1.664,08 Ton
3.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	80,05 (A)

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	10.660.996.950	APBD
2.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	8.977.926.032	APBD

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	603.204.400	APBD
4.	Program Perizinan Usaha Pertanian	16.722.400	APBD
5.	Program Penyuluhan Pertanian	7.793.561.926	APBD
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	23.862.379.127	APBD
51.914.790.835			

Sumber: diolah, Dinas Pertanian 2025

Pagu anggaran APBD-P Tahun 2025 sebesar Rp. 51.914.790.835,- digunakan untuk kegiatan prioritas di Dinas Pertanian terutama peningkatan luas tambah tanam melalui pembangunan irigasi perpompaan dan perpipaan sehingga kebutuhan petani terhadap air dalam kegiatan budidaya dapat tercukupi. Kegiatan prioritas lainnya adalah pemberian bantuan hibah kepada koperasi multi pihak sebagai upaya mendukung penguatan kelembagaan dan pemberdayaan ekonomi petani secara kolektif. Terdapat kegiatan prioritas lain dalam anggaran P-APBD Tahun 2025, antara lain hibah pupuk, benih, dan alat mesin pertanian (alsintan) yang ditujukan untuk mendukung peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha tani.

1.9 Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan PERMENPAN No. 53 Tahun 2014. Perjanjian Kinerja merupakan lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati sebagai pemberi amanah kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pertanian Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Tahun 2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan PDRB Sub Kategori Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura	Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura	0,40%
2.	Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura	Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura	
		- Padi	446.059,21 Ton
		- Jagung	244.120,23 Ton
		- Kedelai	1.200,87 Ton
		- Cabai Besar	4.283,80 Ton
		- Cabai Kecil	4.415,70 Ton
		- Bawang Merah	2.467,90 Ton
		- Tembakau	87.818,97 Ton
		- Tebu	808.960,89 Ton
		- Kopi	2.498,09 Ton
3.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	82 (A)

Sumber: diolah, Dinas Pertanian 2025

BAB II AKUNY

1.10 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.

1.10.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 terdiri atas 2 (dua) dokumen, yaitu Perjanjian Kinerja awal yang disusun berdasarkan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Perubahan Perjanjian Kinerja yang disusun berdasarkan P-APBD Tahun Anggaran 2025, serta mengacu pada dokumen Rencana Strategis (Renstra). Tabel di bawah ini menyajikan capaian kinerja berdasarkan kedua dokumen tersebut. Perlu disampaikan bahwa realisasi Perjanjian Kinerja awal hanya diukur sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, sedangkan Perubahan Perjanjian Kinerja memuat realisasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025.

Perjanjian Kinerja awal Tahun 2025 memuat sasaran strategis dan sasaran program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang Tahun 2025. Adapun target, realisasi, dan capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja awal Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI SD TRIWULAN 3	% CAPAIAN	KRITERIA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya pertumbuhan produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura	Pertumbuhan produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura				
		- Padi	1,30%	N/A	N/A	N/A
		- Jagung	1,30%	N/A	N/A	N/A
		- Kedelai	1,30%	N/A	N/A	N/A
		- Cabai Besar	1,30%	N/A	N/A	N/A

		- Cabai Kecil	1,30%	N/A	N/A	N/A
		- Bawang Merah	1,30%	N/A	N/A	N/A
		- Tembakau	1,30%	N/A	N/A	N/A
		- Tebu	1,30%	N/A	N/A	N/A
		- Kopi	1,30%	N/A	N/A	N/A
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi AKIP perangkat daerah	80,50 (A)	78,80 (B)	97,89	Berhasil
NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI SD TRIWULAN 3	% CAPAIAN	KRITERIA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian yang memadai				
		- Sarana olah tanah	71,25%	54,76%	76,85	Cukup
		- Sarana penanaman	37,99%	28,33%	74,58	Cukup
		- Sarana panen	13,57%	13,03%	96,04	Berhasil
		- Sarana pengairan	39,46%	31,14%	78,92	Cukup
2.	Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentas penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian yang memadai				
		- Jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT)	31,33%	23,94%	76,40	Cukup
		- Jalan Usaha Tani (JUT)	37,02%	26,73%	72,20	Cukup
3.	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian	22%	18,15%	82,5	Berhasil
4.	Program perizinan usaha pertanian	Persentase usaha pertanian yang sudah mendapatkan rekomendasi izin Usaha	11,18%	8,39%	75	Cukup
5.	Penyuluhan pertanian	Persentase poktan yang mendapatkan pembinaan penyuluh yang naik kelas	4,92%	N/A	N/A	N/A
6.	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	75%	75	Cukup

	kabupaten/kota					
--	----------------	--	--	--	--	--

Sumber: diolah, Dinas Pertanian 2025

a. Sasaran 1

Indikator kinerja diukur melalui pertumbuhan produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura yang meliputi komoditas padi, jagung, kedelai, cabai besar, cabai kecil, bawang merah, tembakau, tebu, dan kopi. Masing-masing komoditas ditetapkan target pertumbuhan sebesar 1,30%. Sampai dengan Triwulan III, realisasi belum dapat disajikan (N/A) karena data produksi untuk perhitungan pertumbuhan masih menunggu data produksi dan data pendukung secara lengkap pada akhir tahun.

Upaya pencapaian kinerja dilakukan melalui fasilitasi sarana produksi pertanian, pendampingan dan penyuluhan kepada petani, pemantauan perkembangan luas tanam dan panen, pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), serta koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam mendukung peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian.

Faktor pendukung meliputi dukungan sarana produksi, penyuluhan dan pendampingan petani, serta koordinasi antarinstansi. Adapun faktor penghambat antara lain kondisi cuaca dan iklim yang tidak menentu, potensi serangan OPT, serta dinamika luas tanam dan panen yang dapat memengaruhi hasil produksi.

b. Sasaran 2

Indikator kinerja diukur berdasarkan Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah. Target yang ditetapkan sebesar 80,50 (A), sedangkan realisasi sampai dengan Triwulan III sebesar 78,80 (B). Persentase capaian dihitung dengan membandingkan realisasi terhadap target. Data dukung berupa dokumen perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja, evaluasi internal, serta dokumen pendukung SAKIP lainnya.

Upaya peningkatan akuntabilitas dilakukan melalui penguatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja, penyesuaian target dan indikator, penyusunan serta pemantauan rencana aksi, evaluasi capaian kinerja secara berkala, dan tindak lanjut atas hasil evaluasi untuk memperbaiki kualitas dokumen serta pelaksanaan SAKIP.

Faktor pendukung meliputi komitmen pimpinan, koordinasi antarbidang, ketersediaan dokumen kinerja, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi

secara berkala. Faktor penghambat antara lain masih terdapat dokumen dan data kinerja yang perlu disempurnakan, konsistensi pengukuran dan pelaporan yang perlu diperkuat, serta perlunya percepatan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi agar target nilai AKIP dapat tercapai.

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 memuat 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis. Struktur tersebut berbeda dengan Perjanjian Kinerja awal. Pada Perjanjian Kinerja Perubahan, informasi program disajikan dalam bentuk nama program beserta alokasi anggaran pada masing-masing program, sedangkan target, realisasi, dan capaian kinerja tujuan dan sasaran disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.2 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatkan PDRB Sub Kategori Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura	Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura	0,35%	Belum Rilis	Belum Rilis	Belum Rilis
2.	Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura	Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura				
		- Padi	345.714,23 Ton	441.642,78 Ton	127,75%	Sangat Berhasil
		- Jagung	274.335,80 Ton	243.754,60 Ton	88,85%	Berhasil
		- Kedelai	5.607,32 Ton	1.189,10 Ton	21,21%	Sangat Kurang
		- Cabai Besar	3.023,74 Ton	4.241,80 Ton	140,28%	Sangat Berhasil
		- Cabai Kecil	7.349,87 Ton	4.372,41 Ton	59,49%	Kurang
		- Bawang Merah	2.593,28 Ton	2.443,70 Ton	94,23%	Berhasil
		- Tembakau	92.133,72 Ton	86.958,00 Ton	94,38%	Berhasil
		- Tebu	585.981,40 Ton	801.029,90 Ton	136,70%	Sangat Berhasil
		- Kopi	1.664,08 Ton	2.473,60 Ton	148,65%	Sangat Berhasil
3.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	80,05 (A)	81,65 (A)	101,99%	Sangat Berhasil

	Efektif					
--	---------	--	--	--	--	--

Sumber: diolah, Dinas Pertanian 2025

a. Tujuan

Indikator kinerja sasaran ini adalah Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura dengan target sebesar 0,35%. Sampai dengan akhir Tahun 2025, data realisasi indikator tersebut belum dirilis, sehingga persentase capaian dan kriteria keberhasilan belum dapat dihitung. Pengukuran dilakukan setelah data PDRB tersedia sesuai sumber data dan formulasi yang telah ditetapkan dalam Manual IKU.

Upaya pencapaian sasaran dilakukan melalui peningkatan produksi dan produktivitas komoditas tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura, antara lain melalui fasilitasi sarana dan prasarana pertanian, pendampingan dan penyuluhan kepada petani, pemantauan produksi, pengendalian OPT, serta penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.

Faktor pendukung meliputi potensi produksi pertanian Kabupaten Jombang, dukungan sarana dan prasarana, pendampingan penyuluh, serta koordinasi dengan berbagai pihak. Faktor penghambat antara lain belum tersedianya data PDRB pada saat pelaporan, serta kondisi iklim, cuaca, serangan OPT, dan dinamika produksi pertanian yang dapat memengaruhi kinerja sektor pertanian.

b. Sasaran 1

Upaya peningkatan produksi dilakukan melalui fasilitasi sarana produksi pertanian, penyediaan dan pemanfaatan alat dan mesin pertanian, pendampingan serta penyuluhan kepada petani, pemantauan luas tanam dan panen, pengendalian OPT, serta koordinasi dengan kelompok tani dan pemangku kepentingan terkait. Upaya tersebut diarahkan untuk mempertahankan komoditas yang telah melampaui target sekaligus meningkatkan produksi komoditas yang capaiannya masih di bawah target.

Pencapaian produksi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, terutama dukungan pemerintah, ketersediaan sarana produksi, pendampingan penyuluh, penerapan teknologi budidaya, luas tanam dan luas panen, serta kondisi iklim dan serangan OPT. Tingginya capaian produksi padi menunjukkan bahwa dukungan intervensi pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan. Besarnya dukungan Pemerintah Pusat terhadap komoditas padi, antara lain

melalui program dan bantuan sarana produksi, turut mendorong pencapaian produksi hingga melampaui target. Hal serupa juga didukung oleh penguatan pendampingan dan kelembagaan petani pada komoditas lainnya.

Sebaliknya, capaian yang masih di bawah target menunjukkan adanya keterbatasan intervensi dan pengaruh faktor eksternal. Pada komoditas kedelai, capaian hanya 21,21%, yang antara lain disebabkan tidak adanya dukungan program Pemerintah Pusat, sehingga pengembangan kedelai lebih bergantung pada kemampuan swadaya petani. Selain itu, perubahan luas tanam dan luas panen, kondisi iklim, serta serangan OPT turut memengaruhi produktivitas komoditas.

Kondisi tersebut tercermin pada capaian jagung 88,85%, cabai kecil 59,49%, bawang merah 94,23%, dan tembakau 94,38%. Dengan demikian, capaian produksi menunjukkan bahwa konsistensi dukungan program pemerintah, terutama pada komoditas prioritas, menjadi salah satu faktor penting dalam pencapaian target produksi, sementara komoditas dengan dukungan terbatas memerlukan penguatan intervensi, pendampingan, dan strategi budidaya yang lebih sesuai dengan kondisi lapangan.

c. Sasaran 2

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 80,05 (A), sedangkan realisasi mencapai 81,65 (A). Persentase capaian dihitung dengan membandingkan realisasi terhadap target sehingga capaian kinerja termasuk dalam kategori Sangat Berhasil.

Pencapaian sasaran didukung melalui penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, penguatan akuntabilitas dan pengukuran kinerja, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala, serta tindak lanjut terhadap hasil evaluasi. Selain itu, dilakukan penyempurnaan dokumen kinerja dan penguatan koordinasi antarbidang untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Faktor pendukung meliputi komitmen pimpinan dan aparatur, tersedianya dokumen perencanaan dan kinerja, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta koordinasi antarunit kerja. Hal tersebut mendukung tercapainya realisasi 81,65

(A) yang telah melampaui target 80,05 (A). Adapun faktor yang masih perlu diperhatikan adalah konsistensi penerapan tata kelola dan akuntabilitas kinerja, kualitas data dan dokumen pendukung, serta keberlanjutan tindak lanjut hasil evaluasi agar capaian Reformasi Birokrasi dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun berikutnya.

1.10.2 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir

Berikut ini perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja 2 (dua) tahun sebelumnya, yaitu Tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan 2 (Dua) Tahun Terakhir

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI		
				TAHUN		
				2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatkan PDRB Sub Kategori Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura	Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura	0,35%	0,25%	0,30%	Belum Rilis
2.	Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura	Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura				
		- Padi	345.714,23 Ton	453.502,07 Ton	342.291,32 Ton	441.642,78 Ton
		- Jagung	274.335,80 Ton	270.134,44 Ton	271.619,60 Ton	243.754,60 Ton
		- Kedelai	5.607,32 Ton	5.551,16 Ton	5.551,80 Ton	1.189,10 Ton
		- Cabai Besar	3.023,74 Ton	2.049,83 Ton	2.993,80 Ton	4.241,80 Ton

		- Cabai Kecil	7.349,87 Ton	7.133,87 Ton	7.277,10 Ton	4.372,41 Ton
		- Bawang Merah	2.593,28 Ton	1.891,43 Ton	2.567,60 Ton	2.443,70 Ton
		- Tembakau	92.133,72 Ton	65.969,67 Ton	91.221,50 Ton	86.958,00 Ton
		- Tebu	585.981,40 Ton	827.654,02 Ton	580.179,60 Ton	801.029,90 Ton
		- Kopi	1.664,08 Ton	945,97 Ton	1.647,60 Ton	2.473,60 Ton
3.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	80,05 (A)	80,02 (A)	80,11 (A)	81,65 (A)

Sumber: diolah, Dinas Pertanian 2025

a. Tujuan

Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura menunjukkan tren meningkat, yaitu dari 0,25% pada tahun 2023 menjadi 0,30% pada tahun 2024. Untuk tahun 2025, realisasi masih belum dirilis, sehingga belum dapat dilakukan perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya maupun terhadap target sebesar 0,35%.

Peningkatan pertumbuhan PDRB antara lain didukung oleh peningkatan produksi beberapa komoditas pertanian, khususnya padi, cabai besar, tebu, dan kopi, yang pada tahun 2025 mampu melampaui target produksi. Peningkatan tersebut didukung oleh program pemerintah, bantuan sarana produksi, penerapan teknologi budidaya, serta pendampingan kepada petani. Untuk menjaga dan meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB, dilakukan penguatan produktivitas dan efisiensi usaha tani, pendampingan petani, serta pengembangan komoditas unggulan daerah.

b. Sasaran 1

Perkembangan produksi tahun 2023–2025 menunjukkan kondisi yang beragam pada masing-masing komoditas. Produksi padi meningkat dari 453.502,07 ton pada 2023 menjadi 441.642,78 ton pada 2025 setelah mengalami penurunan pada 2024, dan pada 2025 telah melampaui target sebesar 127,75%. Cabai besar, tebu, dan kopi juga menunjukkan capaian di atas target, masing-masing sebesar 140,28%, 136,70%, dan 148,65%.

Sebaliknya, beberapa komoditas belum mencapai target, yaitu jagung 88,85%, kedelai 21,21%, cabai kecil 59,49%, bawang merah 94,23%, dan tembakau 94,38%. Penurunan paling signifikan terjadi pada kedelai, dari 5.551,32 ton pada 2024 menjadi 1.189,10 ton pada 2025.

Kondisi tersebut tercermin pada capaian jagung 88,85%, cabai kecil 59,49%, bawang merah 94,23%, dan tembakau 94,38%. Dengan demikian, capaian produksi menunjukkan bahwa konsistensi dukungan program pemerintah, terutama pada komoditas prioritas, menjadi salah satu faktor penting dalam pencapaian target produksi, sementara komoditas dengan dukungan terbatas memerlukan penguatan intervensi, pendampingan, dan strategi budidaya yang lebih sesuai dengan kondisi lapangan.

Peningkatan produksi terutama dipengaruhi oleh dukungan sarana produksi, pendampingan penyuluh, penerapan teknologi budidaya, serta dukungan program pemerintah. Tingginya capaian padi juga didukung oleh besarnya dukungan Pemerintah Pusat, sehingga produksi mampu melampaui target.

Sementara itu, penurunan produksi beberapa komoditas dipengaruhi oleh kondisi iklim dan cuaca, serangan OPT, perubahan luas tanam dan luas panen, serta kondisi produksi masing-masing komoditas. Khusus kedelai, rendahnya capaian juga dipengaruhi oleh tidak adanya dukungan program Pemerintah Pusat, sehingga pengembangan komoditas lebih bergantung pada swadaya petani.

Sebagai upaya perbaikan, dilakukan penguatan pendampingan penyuluh, fasilitasi sarana produksi, penerapan teknologi budidaya, pengendalian OPT, serta koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan pemangku kepentingan untuk memperoleh dukungan program, terutama bagi komoditas yang capaian produksinya masih rendah.

c. Sasaran 2

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah menunjukkan tren positif, yaitu meningkat dari 80,02 (A) pada tahun 2023 menjadi 80,11 (A) pada tahun 2024 dan 81,65 (A) pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam penerapan tata kelola pemerintahan dan pelaksanaan reformasi birokrasi pada perangkat daerah.

Peningkatan indeks didukung oleh penguatan tata kelola, peningkatan akuntabilitas kinerja, pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi, serta pelaksanaan program reformasi birokrasi secara berkelanjutan. Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian, dilakukan penguatan koordinasi antarbidang, peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pemantauan tindak lanjut hasil evaluasi, serta peningkatan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi.

1.10.3 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah.

Berikut ini perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen rencana strategis (Renstra) dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD/ RENSTRA	REALISASI	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan PDRB Sub Kategori Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura	Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura	0,55%	Belum Rilis	Belum Rilis
2.	Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura	Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura			
		- Padi	359.405,89 Ton	441.642,78 Ton	124,29%
		- Jagung	285.200,58 Ton	243.754,60 Ton	81,45%
		- Kedelai	5.829,39 Ton	1.189,10 Ton	16,85%
		- Cabai Besar	3.143,49 Ton	4.241,80 Ton	129,07%
		- Cabai Kecil	7.640,96 Ton	4.372,41 Ton	53,86%
		- Bawang Merah	2.695,98 Ton	2.443,70 Ton	89,36%
		- Tembakau	95.782,58 Ton	86.958,00 Ton	97,56%
		- Tebu	609.188,58 Ton	801.029,90 Ton	129,42%
		- Kopi	1.729,98 Ton	2.473,60 Ton	142,98%

3.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	78,00 (B)	81,65 (A)	104,68%
----	---	---	-----------	-----------	---------

Sumber: diolah, Dinas Pertanian 2025

a. Tujuan

Indikator kinerja pada sasaran ini adalah Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura, dengan target akhir RPJMD/Renstra sebesar 0,55%. Sampai dengan tahun 2025, realisasi indikator tersebut belum dirilis, sehingga tingkat progres pencapaian terhadap target jangka menengah belum dapat dihitung.

Belum tersedianya realisasi tersebut disebabkan oleh data PDRB yang masih menunggu publikasi dari instansi yang berwenang. Meskipun demikian, perkembangan produksi beberapa komoditas pertanian yang telah melampaui target, khususnya padi, cabai besar, tebu, dan kopi, menjadi faktor yang berpotensi mendukung peningkatan kontribusi subsektor pertanian terhadap perekonomian daerah. Ke depan, peningkatan produktivitas komoditas unggulan, penguatan nilai tambah hasil pertanian, serta pengembangan usaha pertanian diharapkan dapat mempercepat pencapaian target jangka menengah.

b. Sasaran 1

Indikator sasaran ini diukur melalui jumlah produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura. Secara umum, progres pencapaian terhadap target akhir RPJMD/Renstra menunjukkan hasil yang beragam antar komoditas. Beberapa komoditas telah melampaui target jangka menengah, yaitu padi sebesar 124,29%, cabai besar 129,07%, tebu 129,42%, dan kopi 142,98%. Kondisi tersebut menunjukkan pencapaian yang lebih cepat dari target dan menjadi faktor pendukung pencapaian sasaran produksi secara keseluruhan.

Percepatan pencapaian pada komoditas tersebut didukung oleh ketersediaan sarana produksi, pendampingan penyuluh, penerapan teknologi budidaya, dukungan program pemerintah, serta kondisi produksi yang relatif mendukung. Khusus komoditas padi, tingginya capaian juga didukung oleh besarnya intervensi dan dukungan Pemerintah Pusat, sehingga produksi mencapai 441.642,78 ton dibandingkan target akhir RPJMD/Renstra sebesar 359.405,89 ton.

Sementara itu, beberapa komoditas masih mengalami keterlambatan dalam pencapaian target jangka menengah, yaitu jagung sebesar 81,45%, kedelai 16,85%, cabai kecil 53,86%, bawang merah 89,36%, dan tembakau 97,56%. Kesenjangan paling besar terdapat pada komoditas kedelai, dengan realisasi hanya 1.189,10 ton dari target akhir sebesar 5.829,39 ton.

Keterlambatan tersebut dipengaruhi oleh perubahan luas tanam dan luas panen, kondisi iklim dan cuaca, serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), serta tingkat dukungan program pemerintah pada masing-masing komoditas. Khusus kedelai, rendahnya capaian antara lain berkaitan dengan tidak adanya dukungan program Pemerintah Pusat, sehingga pengembangan komoditas lebih banyak bergantung pada kemampuan dan swadaya petani. Kondisi tersebut menyebabkan pencapaian target kedelai berjalan lebih lambat dibandingkan komoditas yang memperoleh dukungan program lebih besar.

Untuk mempercepat pencapaian target jangka menengah, perlu dilakukan penguatan dukungan sarana produksi, peningkatan pendampingan dan penerapan teknologi budidaya, pengendalian OPT, optimalisasi luas tanam dan luas panen, serta penguatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk memperoleh dukungan program, terutama pada komoditas dengan tingkat pencapaian masih rendah.

c. Sasaran 2

Indikator sasaran ini adalah Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, dengan target akhir RPJMD/Renstra sebesar 78,00 (B). Pada tahun 2025, realisasi telah mencapai 81,65 (A) atau 104,68% dari target akhir, sehingga target jangka menengah telah terlampaui.

Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah berjalan lebih cepat dari target yang ditetapkan. Percepatan pencapaian didukung oleh penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan akuntabilitas kinerja, perbaikan kualitas perencanaan dan evaluasi, pemenuhan dokumen reformasi birokrasi, serta tindak lanjut terhadap hasil evaluasi.

1.10.4 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional.

Realisasi kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Tahun 2024 yang dibandingkan dengan level nasional sesuai data realisasi kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Nasional Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2025	REALISASI NASIONAL TAHUN 2025	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura	Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura			Pembanding dari Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, dan Tanaman Perkebunan Tahun 2025
		- Padi	446.715,00 Ton	60,21 Juta Ton	
		- Jagung	232.294,38 Ton	16,11 Juta Ton	
		- Kedelai	982,52 Ton	Nilai nya sangat kecil dan belum rilis	
		- Cabai Besar	4.057,37 Ton	1,78 Juta Ton	
		- Cabai Kecil	4.115,20 Ton	1,78 Juta Ton	
		- Bawang Merah	2.409,00 Ton	2,19 Juta Ton	
		- Tembakau	93.449,90 Ton	300.000 Ton	
		- Tebu	788.393,62 Ton	39,07 Juta Ton	
		- Kopi	2.473,60 Ton	832.675 Ton	
2.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	81,65 (A)	Belum Rilis	Belum Rilis

Sumber: diolah, Dinas Pertanian 2025

a. Sasaran 1

Secara umum, produksi beberapa komoditas di Kabupaten Jombang menunjukkan kontribusi yang cukup baik terhadap produksi nasional. Komoditas yang paling menonjol adalah tembakau, dengan produksi daerah sebesar 93.449,90 ton dibandingkan produksi nasional sebesar 300.000 ton, sehingga memberikan kontribusi sekitar 31%. Produksi tebu juga cukup kuat, yaitu 788.393,62 ton dari produksi nasional sebesar 39,07 juta ton. Sementara itu, produksi padi sebesar 446.715 ton dan jagung sebesar 232.294,38 ton

menunjukkan bahwa Kabupaten Jombang memiliki basis produksi tanaman pangan yang cukup kuat.

GAP yang terlihat terutama terdapat pada komoditas bawang merah, cabai besar, cabai kecil, dan kopi, yang kontribusinya terhadap produksi nasional masih relatif kecil. Pada komoditas kedelai, data nasional belum dirilis sehingga belum dapat dilakukan perbandingan secara kuantitatif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keunggulan Kabupaten Jombang terletak pada komoditas tembakau, tebu, padi, dan jagung, sedangkan pengembangan komoditas hortikultura dan kedelai masih perlu diperkuat.

Dibandingkan dengan instansi nasional, kelebihan perangkat daerah adalah kemampuan mengelola potensi produksi yang spesifik sesuai karakteristik wilayah dan mendampingi petani secara langsung. Namun, keterbatasannya adalah cakupan dukungan sarana produksi, pembiayaan, teknologi, dan intervensi program yang tidak sebesar Pemerintah Pusat. Strategi yang dapat diimplementasikan adalah memperkuat perencanaan berbasis data produksi, penetapan komoditas unggulan, peningkatan produktivitas melalui teknologi dan benih unggul, pengendalian OPT, serta memperkuat sinergi program dengan Pemerintah Pusat agar dukungan terhadap komoditas potensial dapat lebih optimal.

b. Sasaran 2

Indikator yang digunakan adalah Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Pada tahun 2025, Kabupaten Jombang mencapai 81,65 (A), sedangkan realisasi nasional masih belum dirilis, sehingga GAP secara langsung belum dapat dihitung. Namun, capaian tersebut menunjukkan bahwa tata kelola birokrasi pada perangkat daerah telah berada pada kategori baik.

Kelebihan perangkat daerah adalah telah mampu mencapai predikat A, yang menunjukkan adanya penerapan tata kelola, akuntabilitas, dan reformasi birokrasi yang cukup baik. Sementara itu, kekurangannya adalah masih diperlukan penguatan agar capaian tersebut tidak hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi, tetapi juga semakin memberikan dampak nyata terhadap efektivitas kinerja dan pelayanan.

Strategi yang dapat terus dikembangkan adalah penguatan manajemen kinerja berbasis data, integrasi perencanaan dan evaluasi, digitalisasi proses

kerja, penguatan monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut hasil evaluasi secara konsisten. Pendekatan tersebut dapat memperkuat kualitas tata kelola sekaligus mempertahankan capaian predikat A secara berkelanjutan.

1.10.5 Efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi didefinisikan sebagai hubungan antara hasil (output) yang dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila mampu mencapai output yang optimal dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin. Aspek efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Efisiensi Anggaran

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, efisiensi anggaran dilakukan melalui pengendalian belanja, penyesuaian kebutuhan dengan prioritas kegiatan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan digitalisasi, dengan tetap menjaga pencapaian target kinerja. Perbandingan capaian kinerja dan realisasi anggaran sesuai sasaran strategis dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Tingkat Efisiensi Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran			
			Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan PDRB Sub Kategori Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura	Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura	Belum Rilis	52.151.586.636	48.809.545.369	93,59%
2.	Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura	Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura		28.289.207.509	27.006.592.485	95,47%
		- Padi	127,75%			
		- Jagung	88,85%			
		- Kedelai	21,21%			
		- Cabai Besar	140,28%			

		- Cabai Kecil	59,49%			
		- Bawang Merah	94,23%			
		- Tembakau	94,38%			
		- Tebu	136,70%			
		- Kopi	148,65%			
3.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	101,99%	23.862.379.127	21.802.952.884	91,37%

Sumber: diolah, Dinas Pertanian 2025

Realisasi anggaran mencapai 95,47%, dengan capaian produksi yang bervariasi antar komoditas, yaitu beberapa komoditas telah melampaui target seperti padi, cabai besar, tebu, dan kopi. Efisiensi dilakukan dengan memprioritaskan anggaran pada kegiatan yang berdampak langsung terhadap produksi, mengoptimalkan pendampingan penyuluh, memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia, serta mengurangi belanja operasional yang tidak berdampak langsung terhadap pencapaian produksi.

Capaian kinerja mencapai 101,99%, sementara realisasi anggaran hanya 91,37%. Kondisi ini menunjukkan efisiensi yang sangat baik, karena target kinerja dapat terlampaui dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah. Efisiensi dilakukan melalui digitalisasi administrasi dan perkantoran, optimalisasi rapat daring, selektivitas perjalanan dinas, pengendalian penggunaan ATK dan konsumsi rapat, serta optimalisasi sumber daya dan sarana yang telah tersedia.

Secara keseluruhan, penggunaan anggaran menunjukkan kecenderungan efisien, karena realisasi anggaran pada ketiga sasaran berada di bawah alokasi, sementara pada Sasaran 3 capaian kinerja justru telah melampaui target. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian belanja diarahkan pada prioritas kegiatan yang memberikan dampak langsung terhadap pencapaian kinerja.

b. Efisiensi SDM

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, dilakukan efisiensi sumber daya, khususnya sumber daya manusia, melalui penyesuaian antara kebutuhan organisasi dengan ketersediaan pegawai. Efisiensi sumber daya manusia tersebut dilakukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis

kebutuhan pegawai. Adapun hasil intervensi efisiensi sumber daya manusia dapat dilihat pada Tabel 3.7. dan Tabel 3.8.

Tabel 3.7 Analisis Jabatan dan Analisi Kebutuhan Pegawai

Unit Kerja	Jenis Jabatan	Nama Jabatan	Kls	Bezetting (B)	Kebutuhan (K)	Selisih (S)
Kepala Dinas Pertanian	Struktural	Kepala Dinas Pertanian	14	1	1	-
Sekretaris	Struktural	Sekretaris	12	1	1	-
Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset	Struktural	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset	9	1	1	-
	Fungsional	Perencana Ahli Muda	9	0	3	-3
	Fungsional	Pranata Komputer Ahli Pertama	8	0	3	-3
	Fungsional	Pranata Komputer Terampil	6	0	3	-3
	Fungsional	Arsiparis Terampil	6	0	3	-3
	Pelaksana	Penelaah Teknis Kebijakan	7	3	3	-
	Pelaksana	Pengolah Data dan Informasi	6	2	2	-
	Pelaksana	Pengadministrasi Perkantoran	5	2	2	-
	Pelaksana	Operator Layanan Operasional	3	0	2	-2
Sekretariat (Jabatan Pelaksana Sisi Kanan)	Pelaksana	Pengolah Data dan Informasi	6	1	6	-5
	Pelaksana	Pengadministrasi Perkantoran	5	3	5	-2
Bidang Perlindungan, Pasca Panen dan Pemasaran Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura	Struktural	Kepala Bidang Perlindungan, Pasca Panen dan Pemasaran Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura	11	1	1	-
	Fungsional	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda	9	2	3	-1
	Fungsional	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	8	0	3	-3
	Fungsional	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Terampil	6	0	3	-3
	Fungsional	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama	8	0	3	-3

	Fungsional	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Terampil	6	0	3	-3
	Fungsional	Analisis Pasar Hasil Pertanian Terampil	6	0	3	-3
	Pelaksana	Penelaah Teknis Kebijakan	7	0	5	-5
	Pelaksana	Pengelola Layanan Operasional	6	4	5	-1
	Pelaksana	Pengadministrasi Perkantoran	5	0	5	-5
Bidang Sarana Prasarana Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura	Struktural	Kepala Bidang Sarana Prasarana Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura	11	1	1	-
	Fungsional	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda	9	2	5	-3
	Fungsional	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	8	0	5	-5
	Fungsional	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Muda	9	1	5	-4
	Fungsional	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Pertama	8	0	5	-5
	Pelaksana	Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	6	-5
	Pelaksana	Pengelola Layanan Operasional	6	1	5	-4
	Pelaksana	Pengadministrasi Perkantoran	5	4	4	-
Bidang Produksi Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura	Struktural	Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura	11	1	1	-
	Fungsional	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda	9	3	5	-2
	Fungsional	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	8	0	2	-2
	Pelaksana	Penelaah Teknis Kebijakan	7	0	5	-5
	Pelaksana	Pengolah Data dan Informasi	6	1	3	-2
	Pelaksana	Pengadministrasi Perkantoran	5	3	3	-
UPT Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Struktural	Kepala UPT Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	9	1	1	-
Sub Bagian Tata Usaha (UPT)	Struktural	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	1	1	-

	Pelaksana	Pengolah Data dan Informasi	6	2	4	-2
	Pelaksana	Pengelola Layanan Operasional	6	0	3	-3
	Pelaksana	Pengadministrasi Perkantoran	5	5	5	-
	Pelaksana	Operator Layanan Operasional	3	2	2	-
TOTAL				50	140	-90

Sumber: diolah, Dinas Pertanian 2025

Berdasarkan hasil Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK), kebutuhan ideal pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jombang sebanyak 140 pegawai, sedangkan ketersediaan awal hanya 23 pegawai, sehingga terdapat kekurangan 117 pegawai yang berdampak pada penumpukan beban kerja. Per 31 Desember 2025, jumlah pegawai meningkat menjadi 50 ASN, terdiri dari 20 PNS, 3 PPPK, dan 37 PPPK Paruh Waktu, namun masih belum memenuhi kebutuhan ideal organisasi.

Tabel 3.8 Tingkat Efisiensi Sumber Daya Manusia Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	KETERSEDIAAN SDM (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura	Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura	101,28%	40%	61,28%
		- Padi	127,75%		
		- Jagung	88,85%		
		- Kedelai	21,21%		
		- Cabai Besar	140,28%		
		- Cabai Kecil	59,49%		
		- Bawang Merah	94,23%		
		- Tembakau	94,38%		
		- Tebu	136,70%		
		- Kopi	148,65%		
2.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	101,99%	34,29%	67,70%

Sumber: diolah, Dinas Pertanian 2025

Pada tahun 2025, Dinas Pertanian berhasil mencatatkan efisiensi pengelolaan SDM yang sangat tinggi di tengah keterbatasan jumlah personil. Pada Sasaran Strategis 1 (Meningkatnya Produksi Pertanian), capaian kinerja mampu melampaui target hingga 101,28% dengan tingkat pemenuhan SDM yang hanya sebesar 40%, sehingga menghasilkan tingkat efisiensi SDM mencapai 61,28%. Pendorong utama kinerja produksi ini didukung oleh komoditas Kopi (148,65%), Cabai Besar (140,28%), Tebu (136,70%), dan Padi (127,75%). Sementara itu, pada Sasaran Strategis 2 (Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif), Indeks Reformasi Birokrasi merealisasikan target sebesar 101,99% walau ketersediaan SDM hanya 34,29%, menciptakan efisiensi SDM sebesar 67,70%.

Capaian kinerja yang optimal di bawah kondisi *understaffed* ini menunjukkan bahwa efisiensi tidak sekadar bertumpu pada jumlah pegawai, melainkan hasil dari langkah konkret optimalisasi SDM. Hal ini dicapai melalui digitalisasi alur kerja dan pemanfaatan TIK (e-office serta sistem data pertanian), penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan, serta penataan ulang kebutuhan formasi berbasis beban kerja riil. Selain itu, guna menjembatani gap pemenuhan ASN yang belum ideal, organisasi mengoptimalkan skema pengadaan tenaga non-ASN/PPNPN serta mendorong peran aktif penyuluh swadaya di lapangan.

c. Efisiensi Aset

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, dilakukan efisiensi sumber daya aset melalui optimalisasi pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengelolaan aset yang tersedia sesuai kebutuhan organisasi. Efisiensi tersebut dilakukan untuk menghindari penggunaan aset yang tidak optimal serta mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Adapun hasil intervensi efisiensi sumber daya aset dapat dilihat pada Tabel 3.9 dan Tabel 3.10.

Tabel 3.9 Tingkat Efisiensi Aset Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	JUMLAH KEBUTUHAN ASET	JUMLAH ASET	PEMENIHAN KEBUTUHAN ASET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	JUMLAH KEBUTUHAN ASET	JUMLAH ASET	PEMENIHAN KEBUTUHAN ASET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura	Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura	101,28%	828 Unit	296 Unit	35,75%
		- Padi	127,75%			
		- Jagung	88,85%			
		- Kedelai	21,21%			
		- Cabai Besar	140,28%			
		- Cabai Kecil	59,49%			
		- Bawang Merah	94,23%			
		- Tembakau	94,38%			
		- Tebu	136,70%			
		- Kopi	148,65%			
2.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	101,99%	828 Unit	296 Unit	35,75%

Sumber: diolah, Dinas Pertanian 2025

Meskipun tingkat pemenuhan aset berada di angka 35,75% (hanya terpenuhi 296 unit dari total kebutuhan 828 unit), sasaran strategis dapat dicapai secara optimal dengan capaian kinerja sebesar 101,28% pada produksi pertanian dan 101,99% pada indeks reformasi birokrasi. Keberhasilan ini didorong oleh langkah-langkah efisiensi aset secara konkret, seperti optimalisasi serta pemeliharaan rutin pada 296 unit aset yang ada, pengetatan prioritas pengadaan untuk memangkas kebutuhan barang yang tidak mendesak, serta pelaksanaan pemindahtanganan dan penghapusan aset rusak guna menekan biaya operasional yang tidak produktif. Adapun Rencana Kebutuhan

Barang

Milik Daerah (RKBMD) Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.10 RKBMD Dinas Pertanian Tahun 2025

N O	URAIAN	RKBMD 2025					JUMLA H HASIL REKO N 2023	STANDAR KEBUTUH AN RKBMD 2024	PENGADAAN RKBMD 2025	
		PENGADA AN	PENGHAPU SAN	PEMIND AH TANGAN AN	PEMANFAA TAN	PEMELIHAR AAN			MAKSIM AL	RIIL (USULA N)
1	TV	9	0	0	0	0	9	9	11	2
2	Laptop	142	0	0	0	0	142	142	152	10
3	Smartphon e Tablet	0	0	0	0	0	0	0	6	6
4	Scanner Arsip	12	0	0	0	0	12	12	22	10
5	Printer	140	0	0	0	0	140	140	150	10
6	Lemari Pendingin (Kulkas)	1	0	0	0	0	1	1	2	1
7	CCTV	1	0	0	0	0	1	1	2	1
8	AC	29	2	0	0	0	31	31	35	4
9	Proyektor	27	1	0	0	0	28	28	28	0
10	Kendaraan R2	81	0	4	0	0	77	77	137	60
11	Kendaraan R3	5	0	0	0	0	5	5	10	5
12	kendaraan R4	7	0	0	0	0	7	7	12	5
13	Traktor R2	1	0	0	0	0	1	1	6	5
14	Traktor R4	1	0	0	0	0	1	1	6	5
15	Bego	1	0	0	0	0	1	1	1	0
16	Pompa Air Diesel	28	0	0	0	0	28	28	38	10
17	Tanah	14	0	0	0	0	14	14	15	1
18	Kursi Tamu	2	0	0	0	0	2	2	5	3
19	Meja Tamu	2	0	0	0	0	2	2	5	3

20	Kursi Taman	1	0	0	0	0	1	1	4	3
21	Meja Taman	1	0	0	0	0	1	1	1	0
22	Lampu Taman	1	0	0	0	0	1	1	11	10
23	Genset Generator Listrik	1	0	0	0	0	1	1	3	2
24	Mesin Cacah Kertas	2	0	0	0	0	2	2	4	2
25	Kursi Kerja Eselon 2	3	0	0	0	0	3	3	3	0
26	Kursi Kerja Eselon 3	12	0	0	0	0	12	12	12	0
27	Kursi Kerja Eselon 4	12	0	0	0	0	12	12	12	0
28	Meja Kerja Eselon 2	1	0	0	0	0	1	1	1	0
29	Meja Kerja Eselon 3	4	0	0	0	0	4	4	4	0
30	Meja Kerja Eselon 4	12	0	0	0	0	12	12	12	0
31	Kursi Kerja Kayu Staff	27	0	0	0	0	27	27	27	0
32	Meja Kerja Kayu Staff	78	0	0	0	0	78	78	78	0
33	Lemari Arsip	39	0	0	0	0	39	39	49	10
34	Tangga Lipat	1	0	0	0	0	1	1	4	3
35	Kamera Digital	11	0	0	0	0	11	11	13	2
36	Handycam	1	0	0	0	0	1	1	1	0
37	Lemari Arsip 2 Pintu	1	0	0	0	0	1	1	6	5
38	LCD Proyektor	52	0	0	0	0	52	52	57	5
39	Printer Ink Tank	1	0	0	0	0	1	1	6	5

40	Kipas Angin	6	0	0	0	0	6	6	27	21
41	Colour chart	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42	Pemotong rumput	17	0	0	0	0	17	17	22	5
43	Rehab Pagar Belakang BPP Kecamatan Perak	1	0	0	0	0	1	1	1	0
44	Pembangunan Pagar BPP Kecamatan Bareng	1	0	0	0	0	1	1	2	1
45	Brangkas	1	0	0	0	0	1	1	3	2
46	Filing Kabinet	1	0	0	0	0	1	1	4	3
47	Combine Harvest	1	0	0	0	0	1	1	3	2
48	Drone Pertanian	0	0	0	0	0	0	0	2	2
49	Baterai Drone Sprayer	0	0	0	0	0	0	0	7	7
50	Genset Drone	0	0	0	0	0	0	0	1	1
51	Alat Ubinan	36	0	0	0	0	36	36	57	21
52	Bagan Warna Daun	0	0	0	0	0	0	0	21	21
53	Papan Nama BPP	0	0	0	0	0	0	0	21	21
TOTAL		828	3	4	0	0	827	827	1123	296

Sumber: diolah, Dinas Pertanian 2025

1.11 Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Tahun 2025 setelah P-APBD yaitu sebesar Rp52.151.586.636,00 dengan realisasi sebesar Rp48.809.545.369,00 (93,59%). Rincian alokasi anggaran berdasarkan sasaran strategis disajikan pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11 Realisasi Anggaran

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp10.660.996.950,00	Rp10.171.853.138,00	95,41%
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp8.977.926.032,00	Rp8.774.048.187,55	97,73%
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp603.204.400,00	Rp571.848.149,00	94,80%
Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp16.722.400,00	Rp16.678.898,00	99,74%
Program Penyuluhan Pertanian	Rp8.030.357.727,00	Rp7.472.164.112,45	93,05%

Sumber: diolah, Dinas Pertanian 2025

Kinerja anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Jombang tergolong sangat efektif dan efisien, dengan realisasi mencapai Rp48,81 miliar atau 93,59% dari pagu P-APBD sebesar Rp52,15 miliar, yang selaras dengan melampauinya target capaian kinerja fisik. Keberhasilan penyerapan ini didorong oleh perencanaan yang terukur, percepatan pengadaan barang/jasa berbasis e-katalog, serta koordinasi intensif dengan BPP di 21 kecamatan, sementara sisa anggaran disebabkan oleh efisiensi belanja dan harga penawaran lelang. Penggunaan anggaran secara strategis terbagi ke dalam dua sasaran utama: pertama, peningkatan produksi pertanian didukung oleh alokasi sarana-prasarana (Rp18,95 miliar) melalui modernisasi alsintan dan perbaikan infrastruktur BPP, penguatan kapasitas penyuluhan lapangan (Rp7,47 miliar), mitigasi kekeringan dan hama (Rp571,85 juta), serta regulasi izin usaha (Rp16,68 juta); kedua, mewujudkan tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Rp21,80 miliar)

untuk pemenuhan gaji pegawai, operasional kedinasan, dan optimalisasi aset pendukung kerja.

1.12 Upaya Perbaikan Kinerja

Dengan memperhatikan pencapaian kinerja tahun 2025, maka dapat dilakukan upaya perbaikan kinerja dengan menindaklanjuti hasil evaluasi oleh APIP. Tindak lanjut hasil evaluasi merupakan salah satu sarana introspeksi dan koreksi dalam upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan capaian kualitas implementasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Setelah berakhirnya tahun anggaran 2025 masih ada hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi akuntabilitas kinerja. Berikut tindak lanjut hasil evaluasi dapat dilihat pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12 Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

NO (1)	REKOMENDASI (2)	TINDAK LANJUT (3)
1.	Memastikan kembali analisis/dasar penetapan target tersebut dengan paling tidak hasil evaluasi tahun sebelumnya, keterkaitan dengan kinerja di atasnya, dan hal penting lain untuk menjelaskan secara cukup alasan ditetapkannya target kinerja dalam Kertas Kerja Penetapan Target.	Melaksanakan diskusi singkat dan terfokus dalam perbaikan, penentuan, dan penyusunan Kertas Kerja Penetapan Target
2.	Meningkatkan kualitas dialog kinerja dengan melakukan internalisasi komitmen serta menyusun langkah perbaikan dan percepatan pencapaian tujuan Perangkat Daerah melalui evaluasi kinerja secara sungguh-sungguh kepada seluruh pegawai.	Menyelenggarakan evaluasi internal triwulanan yang berkelanjutan dan terukur, menjamin kejujuran dan validitas data sebagai dasar perbaikan kinerja.
3.	Melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang dan selaras sehingga kualitas kinerja bawahan bisa mendukung kinerja level di atasnya. Perlu mengevaluasi kembali kinerja atasan-bawahan, agar terkoneksi dan memiliki hasil yang sinkron. Sehingga jika terjadi kegagalan pencapaian pada target atasan bisa ditelusuri.	Memastikan kegiatan pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang, akuntabel, dan valid melalui pemanfaatan data yang optimal.
4.	Menerapkan penganggaran berbasis kinerja secara optimal dalam melakukan penyesuaian anggaran dimana hasil pengukuran kinerja titik awal untuk menentukan penyesuaian anggaran yang dibutuhkan.	Telah diimplementasikan penganggaran berbasis kinerja melalui penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk memedomani pelaksanaan kegiatan di periode berikutnya.
5.	Meningkatkan pemahaman dan kepedulian Pegawai atas hasil pengukuran kinerja melalui dialog kinerja untuk menganalisis hasil pengukuran dan pemanfaatannya dalam menyusun langkah perbaikan dan percepatan pencapaian target pada periode selanjutnya.	Menyelenggarakan Review Kinerja Individu Triwulanan untuk mengukur capaian dan menghasilkan rencana aksi dan analisis yang spesifik guna mempercepat pencapaian target periode selanjutnya.
6.	Lakukan langkah-langkah inovatif untuk dapat memicu minat seluruh pegawai untuk peduli dan secara aktif memberikan masukan yang baik dan konkret dalam meningkatkan kualitas LKJIP.	Melaksanakan sesi kerja bersama sehari penuh untuk memberikan arahan teknis dan menyusun LKJIP yang akuntabel dan berkualitas

Sumber: diolah, Dinas Pertanian 2025

Selain rekomendasi dari hasil evaluasi AKIP terdapat upaya perbaikan berdasarkan analisa permasalahan atas kegagalan tahun sebelumnya untuk perbaikan kinerja tahun berikutnya. Berikut upaya perbaikan beserta analisa permasalahan tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15 Matriks Upaya Perbaikan Berdasarkan Analisa Permasalahan

NO	ANALISA PERMASALAHAN	UPAYA PERBAIKAN
(1)	(2)	(3)
1.	Keterbatasan sumber daya, yaitu terbatasnya anggaran dan tenaga ahli untuk mendukung program kegiatan.	Optimalisasi sumber daya melalui melalui pengusulan peningkatan anggaran dan kerjasama dengan sektor swasta untuk mendapatkan dukungan tambahan.
2.	Komunikasi yang kurang efektif dikarenakan informasi tidak tersampaikan dengan baik kepada petani, berdampak pada pelaksanaan program	Peningkatan komunikasi melalui implementasi saluran komunikasi yang lebih baik, seperti pertemuan rutin dan platform digital yang baik untuk penyebaran informasi yang efektif.
3.	Terbatasnya pelatihan baik pegawai dan petani kurang mendapatkan pelatihan tentang teknologi dan praktik pertanian terbaru	Melaksanakan program pelatihan terjadwal melalui penyelenggaraan pelatihan rutin untuk petani dan staf mengenai praktik pertanian yang inovatif dan berkelanjutan
4.	Terbatasnya monitoring dan evaluasi, yaitu tidak ada mekanisme yang jelas untuk memantau progres program secara berkala	Sistem monitoring dan evaluasi perlu dikembangkan dengan sistem yang transparan untuk monitoring dan evaluasi, termasuk laporan bulanan tentang pencapaian dan masalah yang dihadapi. Kolaborasi dengan stakeholders dengan kerjasama dengan lembaga lain, akademisi, dan organisasi non-pemerintah untuk memperluas dukungan dan pengetahuan.

Sumber: diolah, Dinas Pertanian 2025

BAB III

PENUTUP

1.13 Kesimpulan

Secara umum, capaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dan akuntabel. Pada Sasaran Strategis 3 (*Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif*), indikator Indeks Reformasi Birokrasi berhasil melampaui target dengan raih nilai 81,65 (A) dari target 80,05 (capaian 102,00%). Sementara itu, pada Sasaran Strategis 2 (*Meningkatnya Produksi Pertanian*), kinerja komoditas menunjukkan hasil yang responsif terhadap dinamika lapangan; empat komoditas unggulan berhasil melampaui target secara signifikan, yaitu Kopi (148,65%), Cabai Besar (140,28%), Tebu (136,70%), dan Padi (127,75%). Adapun beberapa komoditas hortikultura dan palawija seperti Jagung (88,85%), Bawang Merah (94,23%), Tembakau (94,38%), Cabai Kecil (59,49%), dan Kedelai (21,21%) belum memenuhi target optimal yang dipengaruhi oleh dinamika iklim, tantangan perbenihan, serta fluktuasi harga. Secara keseluruhan, organisasi mampu menjaga efektivitas tata kelola internal sekaligus mendorong lonjakan produksi pada komoditas pangan utama dan perkebunan daerah

1.14 Inovasi dan Penghargaan

Selama tahun 2025, Dinas Pertanian Kabupaten Jombang melaksanakan berbagai inovasi daerah berbasis efisiensi dan modernisasi, seperti penerapan teknologi pertanian presisi melalui pemanfaatan drone sprayer dan mekanisasi terpadu, pengembangan sistem respon cepat penanganan hama serta dampak kekeringan, serta digitalisasi layanan edukasi penyuluhan di Balai Penyuluhan Pertanian 21 kecamatan.

1.15 Upaya Perbaikan

- a. Tujuan: Meningkatkan PDRB Sub Kategori Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura Untuk perbaikan kinerja pada sasaran ini, langkah utama dilakukan melalui koordinasi rutin dan intensif bersama Badan Pusat Statistik guna mengawal integrasi data sektoral agar pertumbuhan PDRB

subkategori pertanian terdata serta terpublikasi secara tepat waktu. Selain itu, dikembangkan pula sentra pengolahan hasil pertanian pascapanen bagi komoditas hortikultura dan perkebunan untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal, yang didukung dengan penguatan kemitraan antara kelompok tani dan pelaku industri pengolahan pangan guna menjamin kepastian harga serta kelancaran rantai pasok.

- b. Sasaran 1: Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura Pada sasaran ini, upaya perbaikan difokuskan pada penanganan khusus komoditas yang belum memenuhi target seperti Kedelai, Cabai Kecil, Bawang Merah, Jagung, dan Tembakau melalui skema tumpang sari, penyediaan benih unggul tahan iklim, penerapan teknologi rain shelter, optimalisasi alokasi DBHCHT, serta fasilitasi pembeli siaga. Di sisi lain, strategi sukses pada komoditas yang melampaui target seperti Padi, Tebu, Kopi, dan Cabai Besar akan direplikasi melalui perluasan modernisasi alat mesin pertanian dan indeks pertanaman. Langkah ini diimbangi dengan pemeliharaan prasarana irigasi, pembangunan embung, penyediaan pompa air untukantisipasi kekeringan, serta penguatan peran penyuluh lapangan melalui bimbingan teknis penerapan teknologi pertanian presisi.
- c. Sasaran 2: Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif Untuk sasaran ini, perbaikan kinerja diarahkan pada pemeliharaan capaian nilai Reformasi Birokrasi kategori A melalui percepatan digitalisasi pelayanan publik sektor pertanian dan ketersediaan informasi harga pasar secara real time. Di samping itu, organisasi memperkuat efisiensi dan tata kelola Barang Milik Daerah, mengutamakan pengadaan barang dan jasa berbasis e-katalog, serta mengintensifkan peningkatan kapasitas SDM ASN guna memperkuat akuntabilitas kinerja instansi secara berkelanjutan.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERTANIAN KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 000.8.6.3/2712/415.27/2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. MUCH RONY, MM
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : WARSUBI, SH., M.Si
Jabatan : Bupati Jombang
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jombang, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua
Bupati Jombang
Ditandatangani secara elektronik



WARSUBI, SH., M.Si

Pihak Pertama
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten
Jombang
Ditandatangani secara elektronik



Ir. MUCH RONY, MM
NIP 196709191992031006



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Sber dan Sandi Negara (BSRN).

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERTANIAN KABUPATEN JOMBANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatkan PDRB Sub Kategori Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura	Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura	0,35%
2.	Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura	Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura	
		Padi	345.714,23 Ton
		Jagung	274.335,80 Ton
		Kedelai	5.607,32 Ton
		Cabai Besar	3.023,74 Ton
		Cabai Kecil	7.349,87 Ton
		Bawang Merah	2.593,28 Ton
		Tembakau	92.133,72 Ton
		Tebu	585.981,40 Ton
		Kopi	1.664,08
3.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	80,05 (A)

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	10.660.996.950	APDB
2.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	8.977.926.032	APDB
3.	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	603.204.400	APDB
4.	Program Perizinan Usaha Pertanian	16.722.400	APDB
5.	Program Penyuluhan Pertanian	7.793.561.926	APDB
6.	Program Penunjang Urusan	23.862.379.127	APDB



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Sber dan Ssdi Negara (BSRN).

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		

Jombang, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua
Bupati Jombang
Ditandatangani secara elektronik



WARSUBI, SH., M.Si

Pihak Pertama
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten
Jombang
Ditandatangani secara elektronik



Ir. MUCH RONY, MM
NIP 196709191992031006



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Sber dan Sertifikasi (BSSN).

2. Penetapan IKU

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERTANIAN KABUPATEN JOMBANG

Nama	: MUCH RONY
NIP	: 196709191992031006
Jabatan	: Kepala Dinas Pertanian
Tugas Pokok	: Perumusan kebijakan di bidang pertanian; Pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian; Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian; Pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian; Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian; Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Fungsi	: coba

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatkan PDRB Sub Kategori Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura	Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura	Perumusan kebijakan di bidang pertanian; Pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian; Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian; Pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian; Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian; Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.	Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura pada Tahun N	Dinas Pertanian, BPS
2	Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura	Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura - Padi	Produksi adalah banyaknya produk usaha tani yang diperoleh dalam rentang waktu tertentu. Satuan yang banyak digunakan adalah ton per tahun atau kg per tahun, tergantung dari potensi hasil setiap jenis komoditas. komoditas yang dimaksud antara lain: 1. Padi 2. Jagung 3. Kedelai 4. Bawang merah 5. Cabe rawit 6. Cabe merah/besar 7. Tebu 8. Tembakau 9. Kopi	Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura - Padi pada Tahun N	Dinas Pertanian
		Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura - Jagung	Produksi adalah banyaknya produk usaha tani yang diperoleh dalam rentang waktu tertentu. Satuan yang banyak digunakan adalah ton per tahun atau kg per tahun, tergantung dari potensi hasil setiap jenis komoditas. komoditas yang dimaksud antara lain: 1. Padi 2. Jagung 3. Kedelai 4. Bawang merah 5. Cabe rawit 6. Cabe merah/besar 7. Tebu 8. Tembakau 9. Kopi	Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura - Jagung pada Tahun N	Dinas Pertanian
		Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura - Kedelai	Produksi adalah banyaknya produk usaha tani yang diperoleh dalam rentang waktu tertentu. Satuan yang banyak digunakan adalah ton per tahun atau kg per tahun, tergantung dari potensi hasil setiap jenis komoditas. komoditas yang dimaksud antara lain: 1. Padi 2. Jagung 3. Kedelai 4. Bawang merah 5. Cabe rawit 6. Cabe merah/besar 7. Tebu 8. Tembakau 9. Kopi	Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura - Kedelai pada Tahun N	Dinas Pertanian
		Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura - Cabai Besar	Produksi adalah banyaknya produk usaha tani yang diperoleh dalam rentang waktu tertentu. Satuan yang banyak digunakan adalah ton per tahun atau kg per tahun, tergantung dari potensi hasil setiap jenis komoditas. komoditas yang dimaksud antara lain: 1. Padi 2. Jagung 3. Kedelai 4. Bawang merah 5. Cabe rawit 6. Cabe merah/besar 7. Tebu 8. Tembakau 9. Kopi	Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura - Cabai Besar pada Tahun N	Dinas Pertanian

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
		Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura - Cabai Kecil	Produksi adalah banyaknya produk usaha tani yang diperoleh dalam rentang waktu tertentu. Satuan yang banyak digunakan adalah ton per tahun atau kg per tahun, tergantung dari potensi hasil setiap jenis komoditas. komoditas yang dimaksud antara lain: 1. Padi 2. Jagung 3. Kedelai 4. Bawang merah 5. Cabe rawit 6. Cabe merah/besar 7. Tebu 8. Tembakau 9. Kopi	Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura - Cabai Rawit pada Tahun N	Dinas Pertanian
		Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura - Bawang Merah	Produksi adalah banyaknya produk usaha tani yang diperoleh dalam rentang waktu tertentu. Satuan yang banyak digunakan adalah ton per tahun atau kg per tahun, tergantung dari potensi hasil setiap jenis komoditas. komoditas yang dimaksud antara lain: 1. Padi 2. Jagung 3. Kedelai 4. Bawang merah 5. Cabe rawit 6. Cabe merah/besar 7. Tebu 8. Tembakau 9. Kopi	Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura - Bawang Merah pada Tahun N	Dinas Pertanian
		Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura - Tembakau	Produksi adalah banyaknya produk usaha tani yang diperoleh dalam rentang waktu tertentu. Satuan yang banyak digunakan adalah ton per tahun atau kg per tahun, tergantung dari potensi hasil setiap jenis komoditas. komoditas yang dimaksud antara lain: 1. Padi 2. Jagung 3. Kedelai 4. Bawang merah 5. Cabe rawit 6. Cabe merah/besar 7. Tebu 8. Tembakau 9. Kopi	Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura - Tembakau pada Tahun N	Dinas Pertanian
		Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura - Tebu	Produksi adalah banyaknya produk usaha tani yang diperoleh dalam rentang waktu tertentu. Satuan yang banyak digunakan adalah ton per tahun atau kg per tahun, tergantung dari potensi hasil setiap jenis komoditas. komoditas yang dimaksud antara lain: 1. Padi 2. Jagung 3. Kedelai 4. Bawang merah 5. Cabe rawit 6. Cabe merah/besar 7. Tebu 8. Tembakau 9. Kopi	Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura - Tebu pada Tahun N	Dinas Pertanian
		Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura - Kopi	Produksi adalah banyaknya produk usaha tani yang diperoleh dalam rentang waktu tertentu. Satuan yang banyak digunakan adalah ton per tahun atau kg per tahun, tergantung dari potensi hasil setiap jenis komoditas. komoditas yang dimaksud antara lain: 1. Padi 2. Jagung 3. Kedelai 4. Bawang merah 5. Cabe rawit 6. Cabe merah/besar 7. Tebu 8. Tembakau 9. Kopi	Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura - Kopi pada Tahun N	Dinas Pertanian
3	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi adalah nilai yang menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Komponen Pengungkit adalah seluruh aspek internal organisasi instansi pemerintah yang melakukan berbagai upaya manajemen untuk mewujudkan output dan outcome bagi masyarakat/pengguna layanan, SDM Aparaturnya, dan bagi komunitas lokal, nasional dan internasional, serta mewujudkan kinerja yang menjadi tujuannya. Komponen Hasil merupakan output dan/atau outcome yang dihasilkan Komponen Pengungkit, yang tidak hanya dirasakan oleh pihak eksternal tetapi juga pihak internal organisasi.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah pada Tahun N	Dinas Pertanian

Tanggal cetak : 19-08-2026 07:10

3. KKPT

KERTAS KERJA PENETAPAN TARGET
DINAS PERTANIAN KABUPATEN JOMBANG

Nama : MUCH RONY

NIP : 196709191992031006

Jabatan : Kepala Dinas Pertanian

Tugas Pokok : Perumusan kebijakan di bidang pertanian;
Pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian;
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian;
Pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian;
Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian;
Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi : coba

No	Indikator Kinerja Utama/ Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan Program/ Kegiatan/	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Satuan	Analisis/Dasar Penetapan
1	Pertumbuhan PDRS Sub Kategori Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura	Meningkatkan PDRS Sub Kategori Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura	0	0	0.35	%	Berdasarkan Dokumen Renstra 2025-2030
2	Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura - Padi	Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura	0	0	345714.23	Ton	Berdasarkan Dokumen Renstra 2025-2030
3	Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura - Jagung	Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura	0	0	274335.80	Ton	Berdasarkan Dokumen Renstra 2025-2030
4	Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura - Kedelai	Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura	0	0	5607.32	Ton	Berdasarkan Dokumen Renstra 2025-2030
5	Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura - Cabai Besar	Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura	0	0	3023.74	Ton	Berdasarkan Dokumen Renstra 2025-2030
6	Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura - Cabai Kecil	Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura	0	0	7349.87	Ton	Berdasarkan Dokumen Renstra 2025-2030
7	Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura - Bawang Merah	Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura	0	0	2593.28	Ton	Berdasarkan Dokumen Renstra 2025-2030
8	Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura - Tembakau	Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura	0	0	92133.72	Ton	Berdasarkan Dokumen Renstra 2025-2030

No	Indikator Kinerja Utama/ Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan Program/ Kegiatan/	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Satuan	Analisis/Dasar Penetapan
9	Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura - Tebu	Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura	0	0	585961.40	Ton	Berdasarkan Dokumen Renstra 2025-2030
10	Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura - Kopi	Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura	0	0	1664.08	Ton	Berdasarkan Dokumen Renstra 2025-2030
11	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	0	0	74	Angka	Berdasarkan Dokumen Renstra 2025-2030

Atasan Langsung


 WARSUBI
 NIP. -
Jombang, 24 Oktober 2025
Kepala Dinas Pertanian

 MUCH RONY
 NIP. 196709191992031008

4. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PELAJIAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

PEMERINTAH KAB. JOMBANG

PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2025

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NO		NO	
1	NAMA	1	NAMA
2	NIP	2	NIP
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	3	PANGKAT/ GOL. RUANG
4	JABATAN	4	JABATAN
5	UNIT KERJA	5	UNIT KERJA
	Ir. MUCH KONY, MM		WARSUBI
	196709191992031006		-
	Pembina Utama Muda / IV/c		-
	Kepala Dinas Pertanian		Bupati
	Dinas Pertanian		Pemerintah Kabupaten Jombang

HASIL KERJA				
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
UTAMA				
1	Meningkatkan PDRB Sub Kategori Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura (Penugasan dari PJ. BUPATI JOMBANG)	Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura	0,35%	Proses Bisnis
2	Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura (Penugasan dari PJ. BUPATI JOMBANG)	Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura - Padi	345.714,23 Ton	Proses Bisnis
		Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura - Jagung	274.335,80 Ton	Proses Bisnis
		Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura - Kedelai	5.607,32 Ton	Proses Bisnis
		Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura - Cabai Besar	3.023,74 Ton	Proses Bisnis
		Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura - Cabai Kecil	7.349,87 Ton	Proses Bisnis
		Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura - Bawang Merah	2.593,28 Ton	Proses Bisnis

HASIL KERJA				
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura - Tembakau	92.133,72 Ton	Proses Bisnis
		Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura - Tebu	585.981,40 Ton	Proses Bisnis
		Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura - Kopi	1.664,08 Ton	Proses Bisnis
3	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif (Penugasan dari PJ. BUPATI JOMBANG)	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	74	Proses Bisnis
TAMBAHAN				
PERILAKU KERJA				
1	Berorientasi Pelayanan			
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: ramah dan solutif dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan mampu memberikan solusi atas permasalahan tersebut		
2	Akuntabel			
	- Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjadi role model/pantulan dalam menunjang komitmen dan integritas pegawai di lingkungan kerjanya		
3	Kompeten			
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersedia untuk mengajarkan atau ketrampilan yang dimiliki/ kepada orang lain - Menyelesaikan setiap pekerjaan sesuai dengan target dan standart kualitas yang ditetapkan		
4	Harmonis			
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Memhargai lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Membaratkan komunikasi yang lebih terbuka kepada siapa saja dan menjaga hubungan baik dengan stakeholder		
5	Loyal			

PERILAKU KERJA	
- Menegakkan teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berani menyampaikan adanya indikasi/ hal-hal yang dapat merugikan dan membahayakan Negara
6 Adaptif	
- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: dapat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, mengikuti perubahan peraturan perundangan yang berlaku dan bertindak proaktif atas perubahan peraturan perundang yang terkait dengan tupoksi
7 Kolaboratif	
- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dalam penyelesaian masalah, berpikiran terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah serta dapat menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama

Pegawai yang Dinilai



Ir. MUCH RONY, MM
196709191992031006

Jombang, 24 Oktober 2025

Pejabat Penilai Kinerja



WARSUHI

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

PEMERINTAH KAB. JOMBANG

PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA	
1.	Dalam rangka memenuhi ekspektasi pimpinan, maka membutuhkan dukungan pegawai yang bertanggung jawab dan berintegritas terhadap kewajibannya sebagai pegawai
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN	
1.	Hasil kerja dilaporkan setiap triwulan berikut hasil pekerjaan yang dilaporkan adalah monev reaksi dan kerja untuk setiap triwulan
KONSEKUENSI	
1.	Apabila memenuhi ekspektasi pimpinan maka akan dipertimbangkan untuk kenaikan jenjang jabatan
2.	Apabila tidak memenuhi ekspektasi pimpinan maka karir siap mendapatkan pembinaan

Pegawai yang Dinilai



Ir. MUCH RONY, MM
196709191992031006

Jombang, 24 Oktober 2025

Pejabat Penilai Kinerja



WARSUHI

5. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja

RENCANA AKSI DI LINGKUANGAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN JOMBANG

Nama : MUCH RONY
NIP : 196709191992031006
Pangkat/Gol Ruang : Pembina Utama Muda / IV/c
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian
Unit Kerja : Dinas Pertanian

Rencana Hasil Kerja :
Meningkatkan PDRB Sub Kategori Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura

Indikator :

1. Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura

Tribulan 1 :

Renaksi

-

Tribulan 2 :

Renaksi

-

Tribulan 3 :

Renaksi

-

Tribulan 4 :

Renaksi

1. Melaksanakan koordinasi peningkatan PDRB sub kategori tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura
Target : 1 Kegiatan

Rencana Hasil Kerja :
Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura

Indikator :

1. Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura - Padi
2. Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura - Jagung
3. Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura - Kedelai
4. Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura - Cabai Besar
5. Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura - Cabai Kecil
6. Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura - Bawang Merah
7. Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura - Tembakau
8. Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura - Tebu
9. Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura - Kopi

Tribulan 1 :

Renaksi

-

Tribulan 2 :

Renaksi

-

Tribulan 3 :

Renaksi

-

Tribulan 4 :

Renaksi

1. Melaksanakan koordinasi persiapan peningkatan produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura
Target : 1 Kegiatan

Rencana Hasil Kerja :
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif

Indikator :

1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Tribulan 1 :

Renaksi

-

Tribulan 2 :

Renaksi

-

Tribulan 3 :
Renaksi
Tribulan 4 :
Renaksi

Atasan Langsung


WARSITI
NIP. -

Jombang, 24 Oktober 2025
Kepala Dinas Pertanian


MUCH BASY
NIP. 19670919199031000

6. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA

TRIBUNAN 4

Nama : MUCH RONY
NIP : 196709191992031006
Pangkat/Gol Ruang : Pembina Utama Muda / IV/c
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian
Unit Kerja : Dinas Pertanian

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEY	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
1	Meningkatkan PORB Sub Kategori Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura	- Pertumbuhan PORB Sub Kategori Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura	Melaksanakan koordinasi peningkatan PORB sub kategori tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00%	Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi terkait peningkatan PORB pertanian	Memperkuat integrasi dan pemutakhiran data produksi serta harga komoditas secara berkala	

Terakhir Finalisasi : Minggu, 15 Februari 2026 20:58

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
2	Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura	- Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura - Padi - Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura - Jagung - Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura - Kedelai - Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura - Cabai Besar - Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura - Cabai Kecil - Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura - Sawang Merah - Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura - Tembakau - Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura - Tebu - Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura - Kopi	Melaksanakan koordinasi persiapan peningkatan produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00%	Data luas tanam dan potensi produksi belum sepenuhnya mutakhir	Pemutakhiran data luas tanam dan kalender tanam secara berkala	

Terakhir Finalisasi : Minggu, 15 Februari 2026 20:58

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
3	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	- Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Melaksanakan koordinasi persiapan peningkatan indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00%	Kelengkapan dokumen eviden belum optimal dan koordinasi antar unit belum sepenuhnya sinkron.	Melakukan pendampingan dan asistensi teknis penyusunan eviden RB dan menetapkan PIC (penanggung jawab) pada tiap area perubahan.	
Rata-rata capaian					100.00%				

Atasan Langsung


 WARSUBI
 NIP.
Jombang, 10 Juni 2026
Kepala Dinas Pertanian

 MUCH RONI
 NIP. 196709191992031006

7. Pengukuran Kinerja

PENGUKURAN KINERJA

TRIBUNAL 4

Nama : MUCH RONY
 NIP : 196709191992031006
 Pangkat/Gol Ruang : Pembina Utama Muda / IV/c
 Jabatan : Kepala Dinas Pertanian
 Unit Kerja : Dinas Pertanian

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIKATOR	TARGET	REALISASI di TRIBUNAL 3	CAPAIAN (%)	RELEVANSI DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN				PENJELASAN	ALTERNATIF / UPAYA YANG TELAKU DILAKUKAN	
						NO	Nama Program/Kegiatan/ Sub-kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			Realisasi (%)
1	Meningkatkan PDRB Sub- Kategori Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura	Pertumbuhan PDRB Sub- Kategori Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura	8,35 %	8,35 %	100,00%	1	Meningkatkan PDRB Sub- Kategori Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura	Rp 51.824.043.894	Rp 48.445.670.064	93,48%	Mengevaluasi kegiatan pada tahun sebelumnya.	Mengevaluasi kegiatan pada tahun sebelumnya.
2	Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura	Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura-Padi	340714,23 Ton	440852,98 Ton	110%	2	Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura	Rp 27.962.596.867	Rp 26.655.853.145	95,33%	Capaian produksi sementara untuk komoditas padi cukup baik.	Mengevaluasi realisasi produksi di tahun depan.
3	Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura	Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura-Jagung	274335,80 Ton	27161956 Ton	110%	3	Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura	Rp 27.962.596.867	Rp 26.655.853.145	95,33%	Capaian produksi sementara untuk komoditas padi cukup baik.	Mengevaluasi realisasi produksi di tahun depan.
4	Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura	Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura-Kedelai	5607,32 Ton	9151,89 Ton	99,01%	4	Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura	Rp 27.962.596.867	Rp 26.655.853.145	95,33%	Capaian produksi sementara untuk komoditas padi cukup baik.	Mengevaluasi realisasi produksi di tahun depan.
5	Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura	Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura-Cabai Besar	3623,74 Ton	2983,76 Ton	99,01%	5	Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura	Rp 27.962.596.867	Rp 26.655.853.145	95,33%	Capaian produksi sementara untuk komoditas padi cukup baik.	Mengevaluasi realisasi produksi di tahun depan.
6	Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura	Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura-Cabai Rawit	1343,87 Ton	7271,89 Ton	99,01%	6	Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura	Rp 27.962.596.867	Rp 26.655.853.145	95,33%	Capaian produksi sementara untuk komoditas padi cukup baik.	Mengevaluasi realisasi produksi di tahun depan.
7	Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura	Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura-Bawang Merah	2583,28 Ton	2567,64 Ton	99,01%	7	Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura	Rp 27.962.596.867	Rp 26.655.853.145	95,33%	Capaian produksi sementara untuk komoditas padi cukup baik.	Mengevaluasi realisasi produksi di tahun depan.
8	Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura	Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura-Tomato	82131,72 Ton	81221,48 Ton	99,01%	8	Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura	Rp 27.962.596.867	Rp 26.655.853.145	95,33%	Capaian produksi sementara untuk komoditas padi cukup baik.	Mengevaluasi realisasi produksi di tahun depan.

Terakhir Finalisasi : Rabu, 14 Januari 2026 13:07

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA (SUKSES)	TARGET	REALISASI a & TRIWULAN I	CAPAIAN (%)	ESTIMASI DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN				PENJELASAN	ALTERNATIF / UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN	
						NO	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			Realisasi (%)
8	Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perikanan, dan Hortikultura	Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perikanan, dan Hortikultura - Tolu	500001.40 Ton	50075.04 Ton	99.01%	8	Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perikanan, dan Hortikultura	Rp 27.962.586.867	Rp 26.655.853.145	95.33%	Capaian produksi sementara untuk komoditas padi cukup baik.	Mengoptimalkan realisasi produksi di tahun depan.
10	Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perikanan, dan Hortikultura	Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perikanan, dan Hortikultura - Kopo	1684.88 Ton	1647.80 Ton	99.01%	10	Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perikanan, dan Hortikultura	Rp 27.962.586.867	Rp 26.655.853.145	95.33%	Capaian produksi sementara untuk komoditas padi cukup baik.	Mengoptimalkan realisasi produksi di tahun depan.
13	Tercapainya Tata Kelola Birestri yang Bersih dan Sehat	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	74 Angka	81.65 Angka	110%	13	Tercapainya Tata Kelola Birestri yang Bersih dan Sehat	Rp 23.962.579.327	Rp 23.789.816.923	99.31%	Rasih tercapai beberapa indikator RB yang terakur dari tahun lalu, sehingga perlu pengoptimalan pertambahan pelaksanaan RB di lingkungan PD.	Mengkoordinasikan dengan penanggungjawab indikator RB PD.
Rata-rata capaian					102.39%							

Atasan Langsung


 WARSUBI
 NIP. -
Jombang, 10 Juni 2026
Kepala Dinas Pertanian

 MUCH RONY
 NIP. 196709191992031006